ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN AGLOMERASI TERHADAP KETIMPANGAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS ANTAR KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2023)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

DI SUSUN OLEH :

BETA RISNAWATI

NIM : 3222030

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1447 H

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang Mu telah memberikanku kekuatan,membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibu dan Abah tercinta

Sebagai tanda bakti,hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Watma) dan Abah (Ramzeli) yang telah memberikan kasih sayang,secara dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Abah dan Ibu bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Abah dan Ibu yang selalu membuat termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus,selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik,
Terimakasih Ibu..... Terimakasih Abah....

Saudara, saudari dan orang terdekatku

Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Riski Fajri, serta keluarga besar Abah dan Ibu). Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangatnya. Semoga doa dan semua hal baik yang telah memberikan kepadaku menjadikanku orang yang baik pula. Dan teruntuk inisial HQS, yang telah memberikan dukungan, hiburan serta menjadi pendengar baik dan selalu memberikan semangat. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga sekarang ini. sukses dan bahagia selalu kedepannya.

Saudara tak sedarah

Teruntuk teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan yang membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sahabat kecilku (Rika Amelia, Hasni Wati, Ira Ramadhani) dan Sahabat dekatku (Intan Permata Sari, Rahmita Fajri Putri Wanety) serta untuk keluarga besar EI-A-2022

Dosen Pembimbing

Ibu Gina Havieza Elmizan, S.E., M.E selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak ibu sudah membantu saya selama ini,sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini terselesaikan.
Terimakasih Ibu.....

Tanpa mereka karya ini tidak akan pernah tercipta

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Beta Risnawati
NIM	:	3222030
Tempat/Tanggal Lahir	:	kubang pipik /06 Juni 2003
Fakultas/Program Studi	:	Faultas Ekonomi dan Bisinis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Pengaruh Investasi Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antar Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul di atas adalah asli karya ilmiah penulis. Penulis tidak mencantumkan karya atau pendapat orang lain kecuali telah dikutip sebagai bahan acuan dalam daftar pustaka dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang baku. Jika di kemudian hari diketahui karya ilmiah ini terbukti bukan karya penulis sendiri. Penulis siap menghadapi sanksi hukum dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Januari 2026
Beta Risnawati **NIM.322230**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " Analisis Pengaruh Investasi Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antar Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023) yang di susun oleh Beta Risnawati dengan Nim (3222030) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isiam Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Januari 2026

Gina Havieza Elmizan, ME
NIP. 199205272020122019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Pengaruh Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2023)**". Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa orang tua saya tercinta Ayahanda Ramzeli dan Ibunda Watma serta saudara ku Riski Fajri yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatian, melimpahkan pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik penulis, terima kasih atas segala do'a dan dukungan semoga nantinya anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan dan bermanfaat bagi banyak orang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, MS.i** selaku rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Rika Widianiata, M.E** selaku ketua Program Studi Ekonom Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu **Uqwatul Alma Wizsa, M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dari awal proses perkuliahan sampai akhir semester.
5. Ibu **Gina Havieza Elmizan, S.E., M.E** selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau.
6. Bapak/ibu **Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama Dosen Ekonomi Islam,** yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Terimakasih atas bimbingannya selama ini.
7. Bapak/ibu **Kepala Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta staf** yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Program Studi Ekonomi Islam, terutama **EI-A** yang menjadi pijakan pertama penulis dalam menempuh perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **keluarga besar MTsS Kubang Pipik** serta **Yayasan Al-Khairat** yang

telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga selesai. Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga bagi penulis dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta bernilai ibadah dan mendapat pahala disisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, Januari 2026

BETA RISNAWATI

NIM. 3222030

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah umum di negara berkembang, termasuk Indonesia, ditandai perbedaan pendapatan, kesempatan kerja, dan infrastruktur antarwilayah. Data BPS Provinsi Sumatera Barat (2018–2023) menunjukkan nilai Indeks Gini berkisar 0,194–0,394, dengan ketimpangan lebih tinggi di kota dibanding kabupaten. Faktor utama penyebab ketimpangan adalah konsentrasi investasi dan aglomerasi di wilayah maju, sementara daerah tertinggal minim perhatian, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merata. Perspektif Ekonomi Islam menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan, mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang merata sesuai syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data numerik terkait investasi, aglomerasi, dan ketimpangan ekonomi wilayah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama 2018–2023. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan metode data panel (*time series* dan *cross section*) untuk menggambarkan dinamika ketimpangan ekonomi. Penelitian bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menilai pengaruh investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi, menggunakan sampel periode enam tahun yang dipilih melalui *purposive sampling* dan dilaksanakan pada tahun 2025.

Hasil uji parsial menunjukkan investasi memiliki nilai t-hitung sebesar 0,104165 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,980922, sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat periode 2018–2023. Sebaliknya, aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah dengan nilai t-hitung sebesar 4,613425 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,99254. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa investasi dan aglomerasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode penelitian.

Kata Kunci: Investasi, Aglomerasi, Ketimpangan Ekonomi, Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
F. Penjelasan Judul 14
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Konsep Ketimpangan Ekonomi Wilayah 16
B. Tinjauan Investasi 26
C. Konsep Aglomerasi 39
D. Penelitian Terdahulu 45
E. Kerangka Pemikiran 48
F. Hipotesis Penelitian 50
BAB III METODE PENELITIAN **55**
A. Jenis Penelitian 55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 56
C. Jenis Data dan Sumber Data 56
D. Populasi dan Sampel 57
E. Definisi Operasional Variabel 58
F. Teknik Pengumpulan Data 61
G. Teknik Analisis Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN **66**
A. Gambaran Umum 66
B. Hasil Analisis Statistik 78
C. Pembahasan 90

BAB V PENUTUP.....103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA.....106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ketimpangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2
Tabel 1.2 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 4
Tabel 1.3 Aglomerasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 46
Tabel 4.1 Data Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Desimal) 72
Tabel 4.2 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Desimal).....75
Tabel 4.3 Aglomerasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Desimal) 76
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 79
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 80
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 82
Tabel 4.7 Hasil Regresi Random Effect Model 84
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial) 86
Tabel 4.9 Hasil Uji F (Simultan).....88
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (Dalam Desimal) 114

Lampiran 2 Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (Dalam Desimal) 115

Lampiran 3 Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Dalam Desimal) 116

Lampiran 4 Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Dalam Desimal) 117

Lampiran 5 Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Dalam Desimal) 118

Lampiran 6 Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Dalam Desimal) 119

Lampiran 7 Perhitungan Aglomerasi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Desimal) 120

Lampiran 8 Data Penelitian 121

Lampiran 9 Hasil Regresi 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang umum terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini ditandai dengan adanya perbedaan tingkat kemajuan Ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dalam hal pendapatan per kapita, infrastruktur, kesem patan kerja, maupun kualitas sumber daya manusia.

Menurut kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2023**,** serta merujuk pada Perpres Nomor 63 Tahun 2020**,** daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.[i 1] Penetapan suatu wilayah sebagai daerah tertinggal didasarkan pada enam kriteria utama, yaitu tingkat perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik khusus daerah tersebut.

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dan sosiologi asal Italia. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat

[1] Kemensesneg, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024', *Kementerian Sekretariat Negara*, 018390, 2020, pp. 1–8

merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi, yaitu ketika seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu kelompok masyarakat.. Semakin besar perbedaan itu, semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Williamson, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa ekonomi antar wilayah relatif merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi sangat tinggi.

Dalam Ekonomi wilayah masih ada ketimpangan antara daerah yang berkembang pesat dan daerah yang tertinggal. Perbedaan kemampuan ekonomi ini terlihat dari variasi pendapatan per kapita yang semakin memperlebar ketimpangan ekonomi. Menurut Indeks Williamson, ketimpangan terjadi ketika sebagian wilayah memiliki pertumbuhan dan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga ekonomi tidak berjalan merata. dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Ketimpangan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,306	0,336	0,273	0,321	0,233	0,259
2	Pesisir Selatan	0,255	0,246	0,264	0,253	0,246	0,259
3	Solok	0,303	0,285	0,277	0,246	0,243	0,235
4	Sijunjung	0,3	0,293	0,269	0,27	0,243	0,263
5	Tanah Datar	0,288	0,278	0,273	0,25	0,251	0,26
6	Padang Pariaman	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245	0,257
7	Agam	0,257	0,251	0,278	0,272	0,298	0,255
8	Lima Puluh Kota	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194
9	Pasaman	0,266	0,33	0,31	0,248	0,23	0,243
10	Solok Selatan	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271
11	Dharmasraya	0,264	0,278	0,28	0,268	0,287	0,291
12	Pasaman Barat	0,29	0,283	0,258	0,261	0,277	0,238
13	Kota Padang	0,344	0,312	0,312	0,343	0,354	0,312

14	Kota Solok	0,296	0,271	0,286	0,277	0,288	0,256
15	Kota Sawah Lunto	0,31	0,289	0,3	0,295	0,314	0,308
16	Kota Padang Panjang	0,29	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273
17	Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255
18	Kota Payakumbuh	0,302	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316
19	Kota Pariaman	0,316	0,3	0,31	0,301	0,272	0,289

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa nilai Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode 2018–2023 berada pada kisaran 0,194–0,394, yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah hingga sedang. Secara umum, kota-kota seperti Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh memiliki nilai Gini lebih tinggi dibandingkan kabupaten, menandakan ketimpangan pendapatan lebih besar di wilayah perkotaan. Sebaliknya, kabupaten seperti Lima Puluh Kota, Solok, dan Tanah Datar memiliki ketimpangan lebih rendah karena pendapatan masyarakatnya lebih merata. Selain itu, terlihat adanya fluktuasi nilai Gini dari tahun ke tahun, misalnya peningkatan ketimpangan di Kota Padang Panjang pada tahun 2020, kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang terjadi pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata ketimpangan tidak tinggi, distribusi pendapatan antarwilayah masih berbeda, sehingga perlu perhatian khusus dalam upaya pemerataan ekonomi

Faktor investasi juga menjadi kunci dalam menentukan dampak balik pertumbuhan wilayah. teori ekonomi, investasi dipandang sebagai faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori Harrod-Domar menegaskan bahwa peningkatan investasi akan menambah stok modal, yang

pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi dan *output* nasional.[2] Semakin besar tingkat investasi, semakin cepat pula laju pertumbuhan Ekonomi wilayah yang dapat dicapai.

Investasi cenderung terpusat di daerah yang sudah maju dan memiliki infrastruktur memadai, sementara wilayah tertinggal sering kali kurang mendapatkan perhatian dari investor.[3] Kondisi ini menyebabkan perbedaan kemampuan daerah dalam mengembangkan sektor ekonominya, sehingga memperlebar kesenjangan Ekonomi wilayah. Selain itu, rendahnya investasi di wilayah tertentu juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik.[4] Akibatnya, ekonomi berjalan tidak merata, produktivitas daerah tertinggal rendah, dan peluang kerja menjadi terbatas. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, ketimpangan penyalurannya justru dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antarwilayah. Kondisi ini membuat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut berjalan lebih lambat dan ketimpangan wilayah semakin tinggi, yang dapat dilihat pada:

Tabel 1.2

[2] D Fatihudin, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi* (Deepublish, 2019)

[3] Sulton Mu'minah And M. B. Zubakhrum Tjenreng, 'Desentralisasi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah', *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 8.1 (2025), Pp. 342–51.

[4] Frida Venti Valentina, Vicky Alfiyan, and Mochammad Isa Anshori, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Era Desentralisasi', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 1.5 (2024), pp. 285–92.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,024	0,015	0,016	0,016	0,029	0,012
2	Pesisir Selatan	0,424	0,186	0,195	0,195	0,156	0,015
3	Solok	0,032	0,069	0,057	0,057	0,090	0,014
4	Sijunjung	0,053	0,133	0,024	0,024	0,141	0,256
5	Tanah Datar	0,004	0,021	0,004	0,004	0,012	0,016
6	Padang Pariaman	0,248	0,252	1,197	0,996	0,344	1,199
7	Agam	0,354	0,138	0,035	0,035	0,085	0,377
8	Lima Puluh Kota	0,009	0,054	0,255	0,255	0,283	0,283
9	Pasaman	0,001	0,039	0,001	0,001	0,024	0,066
10	Solok Selatan	0,571	0,412	0,827	0,827	0,252	0,236
11	Dharmasraya	0,036	0,016	0,014	0,014	0,334	0,879
12	Pasaman Barat	0,377	0,315	0,037	0,037	0,225	0,072
13	Kota Padang	0,339	1,436	0,484	0,484	0,520	0,609
14	Kota Solok	0,002	0,009	0,004	0,004	0,013	0,022
15	Kota Sawah Lunto	0,000	0,011	0,000	0,003	0,113	0,213
16	Kota Padang Panjang	0,004	0,014	0,027	0,027	0,012	0,010
17	Kota Bukittinggi	0,011	0,055	0,016	0,016	0,003	0,013
18	Kota Payakumbuh	0,000	0,010	0,008	0,008	0,017	0,058
19	Kota Pariaman	0,002	0,000	0,033	0,033	0,002	0,002

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2018-2023

Data realisasi investasi menunjukkan ketimpangan yang sangat mencolok antarwilayah. Beberapa daerah seperti Padang Pariaman, Kota Padang, Solok Selatan, dan Dharmasraya mengalami lonjakan investasi yang signifikan pada tahun-tahun tertentu, misalnya Padang Pariaman mencapai 1,197 pada 2020 dan kembali tinggi di 2023 sebesar 1,199, serta Kota Padang mencapai puncak 1,436 pada 2019. Sebaliknya, daerah seperti Kota Solok, Kota Pariaman, Tanah Datar, dan Pasaman hanya mencatat realisasi investasi sangat rendah dan cenderung stagnan pada kisaran 0,002–0,033 sepanjang periode pengamatan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa arus investasi masih

terpusat pada wilayah strategis yang memiliki potensi industri besar, kedekatan pasar, dan ketersediaan infrastruktur, sementara daerah lain belum menjadi tujuan menarik bagi investor. Kondisi ini berpotensi memperlebar gap ekonomi, dengan wilayah penerima investasi besar bergerak lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah dengan realisasi rendah tetap tertinggal dan kurang kompetitif dalam menarik modal baru.

Selain faktor investasi, pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu atau aglomerasi juga memperbesar ketimpangan ekonomi wilayah. [5] Aglomerasi memungkinkan efisiensi biaya produksi karena kedekatan antara produsen, konsumen, dan penyedia input (*Hoove*r). Myrdal dalam konsep *cumulative causation*. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di satu wilayah dapat menimbulkan efek penarik (*circular and cumulative causation*), di mana sumber daya ekonomi dan tenaga kerja berpindah ke daerah yang sudah maju.[6] Sementara itu, daerah dengan aktivitas ekonomi terbatas mengalami penurunan daya saing dan lambat dalam peningkatan pendapatan. Dalam konteks Sumatera Barat, kondisi ini tercermin dari pertumbuhan yang tidak merata antar sektor, di mana sektor dengan basis industri dan pertambangan meningkat pesat, sedangkan sektor-sektor jasa, pengelolaan air, dan *real estate* cenderung tidak berubah atau meningkat dalam skala kecil.

Konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada wilayah atau sektor tertentu, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi wilayah semakin tinggi. Pertumbuhan

[5] Astuti, 'Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi Di Indonesia', *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15.1 (2016), pp. 165–75.

[6] Muhammad Fitri Rahmadana, *Teori-Teori Tentang Wilayah Dan Migrasi Muhammad Fitri Rahmadana*, ed. by Badrus Sholeh (Purwokerto : Pena Persada, 2020). p 14.

yang hanya terfokus pada daerah dengan potensi industri dan pertambangan membuat sumber daya manusia, modal, dan investasi lebih banyak mengalir ke wilayah maju, sementara daerah dengan aktivitas ekonomi terbatas mengalami perlambatan dan kehilangan daya saing. Dalam konteks Sumatera Barat, hal ini terlihat dari ketimpangan antar sektor yang cenderung stagnan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi belum berjalan secara merata, karena belum semua sektor dan wilayah mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan Ekonomi wilayah. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.3

Aglomerasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
2	Pesisir Selatan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Solok	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Sijunjung	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
5	Tanah Datar	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Padang Pariaman	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Agam	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
8	Lima Puluh Kota	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9	Pasaman	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
10	Solok Selatan	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
11	Dharmasraya	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
12	Pasaman Barat	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
13	Kota Padang	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Kota Solok	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
15	Kota Sawah Lunto	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
16	Kota Padang Panjang	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
17	Kota Bukittinggi	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
18	Kota Payakumbuh	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

19	Kota Pariaman	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06

(Sumber Data BPS 2025 Diolah)

Data aglomerasi 2018–2023 menunjukkan adanya ketimpangan yang jelas antara wilayah kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto konsisten memiliki nilai aglomerasi tertinggi (0,07–0,09), menandakan tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi dan layanan. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten seperti Pesisir Selatan, Pasaman, dan Solok Selatan berada pada level rendah (0,03–0,04) dan cenderung stagnan. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah, sehingga aglomerasi masih berpusat di kota-kota besar dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di Sumatera Barat.yang menunjukkan bahwa proses penyebaran pertumbuhan belum merata dan sebagian wilayah justru mengalami penarikan sumber daya ekonomi *(circular and cumulative causation)* ke daerah yang lebih maju, sehingga mengindikasikan adanya potensi ketimpangan Ekonomi wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Kenaikan yang sangat besar pada tiga sektor utama tersebut menunjukkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi ekonomi di wilayah-wilayah tertentu.[7] Aglomerasi terjadi ketika aktivitas ekonomi terkumpul di suatu daerah karena faktor efisiensi, infrastruktur, tenaga kerja, dan akses pasar yang lebih baik. Menurut teori Paul Krugman, kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, namun pada saat yang sama dapat memperluas perbedaan

[7] Ariesy P Tri Mauleny, 'Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6.2 (2015), pp. 147–62

tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah.[8] Hal ini terjadi karena daerah yang memiliki aktivitas ekonomi padat akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah lain dengan tingkat aktivitas rendah akan tertinggal.

Berbagai riset telah dilakukan terkait ketimpangan ekonomi antarwilayah. Penelitian Yeniwati menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Sumatera pada periode 2005–2010, yang disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam yang tidak merata sehingga pertumbuhan setiap provinsi juga berbeda. Agar mampu tumbuh lebih cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat.[9]

Penelitian Sukmawati menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan apabila difokuskan pada belanja modal seperti ekonomi infrastruktur dan sarana produktif.[10] Hal ini berarti bahwa peningkatan belanja modal mampu mendorong pemerataan ekonomi dan memperkecil kesenjangan wilayah. Sebaliknya, aglomerasi industri justru memperbesar ketimpangan karena kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah inti seperti Kota Semarang, sementara daerah sekitarnya tertinggal dalam akses terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, belanja pemerintah yang produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan, sedangkan aglomerasi yang berlebihan tanpa pemerataan investasi dan infrastruktur

[8] Ridwan, Ismail Hajiali, and Rifai, *Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil)*, (Yogyakarta : *Perpustakaan Belajar*, 2022). p 65.

[9] Yeniwati, 'Yeniwat, Ketimpangan Ekonomi Antar Di Sumatera', *Jurnal Kajian Ekonomi j 2.032013),1-21.*, II.03 (2013), pp. 1–21.

[10] Ade Tiara and Mulyo Hendarto, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Kedungsepur Tahun 2011-2020', *Diponegoro Journal of Economics*, 12.3 (2023), pp. 1–12.

berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah

Dengan demikian, ketimpangan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari perspektif ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi perhatian dalam kajian Ekonomi Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Ekonomi Islam, Ekonomi wilayah tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sebuah konsep ekonomi syariah.[11] Konsep ini mempelajari dan menganalisis proses ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ekonomi di suatu wilayah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan.

Pandangan Ekonomi Islam menekankan bahwa sistem perekonomian harus mencerminkan nilai keadilan dan keharmonisan. Hal ini diwujudkan dengan memberi kesempatan yang proporsional bagi setiap individu untuk memperoleh hak-haknya secara penuh, sekaligus menciptakan iklim sosial yang saling mendukung (harmonis) antaranggota masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan atau *falah* dapat tercapai.

Keberhasilan ekonomi wilayah dalam pandangan Islam menuntut adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.[12] Upaya ini sejalan dengan anjuran QS. Al-Hasyr (59): 7 yang mendorong umat Islam untuk bekerja dan berusaha dalam kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kehidupan yang lebih adil dan Sejahtera.

---

[11] Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi, 'Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8.1 (2024), p. 729,

[12] Amsari, Harahap, and Nawawi.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya : *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."*

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan setiap orang mukmin untuk berusaha, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Setiap usaha yang dilakukan tidak akan luput dari pengawasan Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Hasil dari usaha tersebut sepenuhnya merupakan ketentuan Allah, yang akan memberikan balasan sesuai dengan amal baik maupun buruk yang diperbuat.[13] Karena itu, setiap aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan secara syariah, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan Ketimpangan ekonomiwilayah merupakan tantangan yang nyata dalam proses ekonomi. Ketimpangan muncul ketika hasil ekonomi dan aliran investasi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga daerah lain tertinggal.[14] Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja keras yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan merata sesuai dengan prinsip syariah, agar

[13] Sulaiman Jaluli, 'Ekonomi Dalam Alquran', (Yogyakarta : *Deepublish* 2018) p. 131 .

[14] Cholly Fatun Nisa and others, 'Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Di 34 Provinsi Di Indonesia', *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 3 (2025), pp. 454–66

kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta dalam hal ini perlu adanya penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam ketimpangan ekonomi agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dengan judul penelitian **Analisis Pengaruh Investasi Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antar Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023)** .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat dua variabel yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2023 yaitu Investasi dan Aglomerasi.
2. Nilai Investasi di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah besar namun belum merata di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Terjadinya Aglomerasi secara regional di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan tidak meluas maka terdapat batasan masalah yaitu hanya berkaitan analisis pengaruh investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan Ekonomi Wilayah dalam

perspektif ekonomi islam kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2018 – 2023. Faktor-faktor Investasi dan Aglomerasi dipilih karena kedua variabel ini paling signifikan pengaruhnya terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023?
2. Apakah aglomerasi berpengaruh terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023?
3. Apakah investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.
b. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.
c. Untuk mengetahui pengaruh investasi dan aglomerasi terhadap tingkat Ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun

2018-2023 secara simultan.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap tingkat Ketimpangan ekonomiwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.

b. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan Ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.

c. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara simultan.

F. Penjelasan Judul

Untuk memberikan pemahaman lebih tentang "**Analisis Pengaruh Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023)"**

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang dapat membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. Investasi

Investasi dalam arti luas adalah merupakan pengorbanan atas sejumlah

sumber daya saat ini dengan harapan untuk memperoleh sejumlah kompensasi atau keuntungan dimasa datang.

3. Aglomerasi

   Aglomerasi merupakan pemusatan spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dengan tujuan memperoleh penghematan akibat lokasi industry yang berdekatan *(economies of proximity)* yang digambarkan dengan kluster spasial dari perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen

4. Ketimpangan Ekonomi Wilayah

   Ketimpangan Ekonomi Wilayah adalah kondisi di mana terjadi perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, kesejahteraan, dan hasil ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam suatu negara. Ketimpangan ini dapat terlihat dari perbedaan dalam kesempatan kerja, tingkat investasi, kualitas infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.[15]

5. Ekonomi Islam

   Menurut Baqir Al-Shadr ekonomi Islam adalah suatu doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena dia adalah suatu cara yang direkomendasikan Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi.[16]

6. Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

   Kota dan provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, baik dari segi potensi sumber

[15] Sjafizal, *Ekonomi Regional* (Padang : Baduose Media, 2008). p 104

[16] Yefri Joni, *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al Shadr* (Wade Group National Publishing, 2021). p 31

daya alam, tingkat investasi, maupun kegiatan ekonomi masyarakatnya.[17]

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Ketimpangan Ekonomi Wilayah

1. Pengertian Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan ekonomi wilayah merupakan salah satu fenomena yang umum dijumpai dalam proses ekonomi suatu negara, termasuk di negara-negara berkembang. Secara umum, ketimpangan dapat dipahami sebagai perbedaan dalam distribusi hasil ekonomi yang menyebabkan sebagian wilayah atau kelompok masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan yang lain.[18] Menurut Todaro dan Smith ketimpangan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi, baik antar individu maupun antar wilayah. [19] Sukirno menambahkan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah muncul ketika hasil ekonomi tidak tersebar secara merata, sehingga terdapat kelompok masyarakat atau daerah yang menikmati kemajuan pesat, sedangkan yang lainnya masih tertinggal jauh.[20] Dari perspektif ekonomi wilayah, ketimpangan ekonomi antar daerah berarti adanya perbedaan signifikan dalam hal pertumbuhan wilayah, kesempatan

[17] Yenni Del Rosa, 'Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient)', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3.2 (2019), p. 208

[18] Raharti, Laras, and Oktavianti.

[19] Stephen C. Smith Michael P. Todaro, 'Economic Development', (Jakarta : *Erlangga*, 2006)p. 248.

[20] Muh Nur, 'Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas' (Indramayu : Adanu Abimata, 2024), p. 58

kerja, serta akses terhadap layanan dasar.[21] Dengan demikian, ketimpangan ekonomi wilayah dapat dipandang sebagai suatu kondisi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat.

2. Karakteristik Ketimpangan Ekonomi

a. Konsentrasi aktivitas ekonomi di perkotaan

Pertumbuhan ekonomi umumnya terpusat di kota atau kawasan industri.[22] Kota menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan lapangan kerja sehingga menarik banyak investasi. Sebaliknya, wilayah pedesaan atau pinggiran hanya berfungsi sebagai daerah penyangga tanpa memperoleh manfaat besar dari aktivitas ekonomi tersebut.[23]

b. Akses fasilitas tidak merata

Ketimpangan juga tampak dari perbedaan akses masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Fasilitas ini lebih mudah diperoleh oleh masyarakat perkotaan, sementara masyarakat desa kerap mengalami keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan. Kondisi ini semakin memperdalam kesenjangan antar wilayah.

---

[21] Wahyu Hidayat, 'Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), p. 26

[22] Mahdi Syahbandir · 2024 T. Ahmad Dadek, Safrizal ZA, *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia Tinjauan Filsafat, Teori, Dan Implementasi; Panduan Bagi Teknokrat, Akademisi, Dan Politisi Dalam Perencanaan Pembangunan* (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh, 2024)

c. Kecenderungan ekonomi terpusat di perkotaan

Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi lebih banyak kepada wilayah perkotaan karena dianggap sebagai penggerak ekonomi. [24] Akibatnya, wilayah pedesaan sering diabaikan atau hanya mendapat perhatian kecil. Keberpihakan ini memperlebar jurang perbedaan antara kota dan desa, serta memperkuat ketidakadilan ekonomi antar wilayah.

d. Ketimpangan bukan hanya soal pendapatan

Ketimpangan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diterima masyarakat, tetapi juga mencakup aspek kesempatan dan akses. [25] Artinya, meskipun pendapatan suatu wilayah meningkat, jika masyarakat tidak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi, maka ketimpangan tetap terjadi.

3. Indikator Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang sulit dihindari dalam proses ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang sedang berusaha mengejar pertumbuhan. [26] Perbedaan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kapasitas teknologi, serta ketersediaan infrastruktur antar daerah sering kali menimbulkan ketimpangan Ekonomi.

[24] Septiana Hariyani Imma Widyawati Agustin, *Pengelolaan Infrastruktur Kota Dan Wilayah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023). p 235

[25] Aufa Nadya and Syafri Syafri, 'Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), pp. 37–52,

[26] Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang* (Maksar : Sah Media, 2018). p 22

Selain itu, akses yang tidak merata terhadap modal, informasi, dan jaringan pasar juga memperkuat ketimpangan antar wilayah.

Dalam kajian ekonomi regional, ketimpangan ekonomi wilayah menjadi isu penting karena dapat memengaruhi stabilitas sosial, politik, maupun ekonomi nasional.[27] Ketimpangan ekonomi wilayah yang terlalu besar dapat menimbulkan kecemburuan antar daerah, memperburuk kemiskinan struktural, hingga memicu konflik sosial.[28] Oleh sebab itu, diperlukan indikator atau tolak ukur yang dapat menggambarkan secara objektif sejauh mana ketimpangan ekonomi wilayah terjadi. Dengan adanya indikator ini, pemerintah maupun akademisi dapat menilai keberhasilan ekonomi, mengidentifikasi wilayah yang tertinggal, dan merumuskan kebijakan yang lebih adil.

Gini Ratio adalah alat yang digunakan untuk melihat seberapa merata atau ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilainya berada antara 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 0, berarti pendapatan masyarakat semakin merata. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Berikut adalah rumus Gini Ratio yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\boldsymbol{G = 1 - i = 1\sum n(Yi + Yi - 1)(Xi - Xi - 1)}$$

G : Gini Ratio ($0 =$ merata, $1 =$ timpang)

X_i: proporsi kumulatif penduduk sampai kelompok ke-i

[27] Faradina Zevaya Dwi Hastuti, Loso Judijanto, Sri Yani Kusumastuti, Parmadi Parmadi, Alifah Rokhmah Idialis, Hermien Triyowati, Nuriah Alfisyahri, Putri Intan Suri, Tri Kunawangsih, Etik Umiyati, Jaya Kusuma Edy, *Ekonomi Pembangunan II* (DJambi : Son Pedia, 2025) . p 29

[28] Syaiful Anwar Wirdanengsih, *Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Perspektif Sosial* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025) . p 38

Y_i: proporsi kumulatif pendapatan sampai kelompok ke-i

n: jumlah kelompok penduduk

$X_0 = Y_0$ $X_0 = 0$ titik awal kurva Lorenz

Menurut kriteria Oshima, tingkat ketimpangan pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, apabila nilai Gini Ratio kurang dari atau sama dengan 0,4, maka ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Kedua, jika nilai Gini Ratio berada di antara 0,4 hingga 0,5, ketimpangan pendapatan termasuk kategori sedang. Ketiga, apabila nilai Gini Ratio sama dengan atau lebih dari 0,5, maka ketimpangan pendapatan sudah tergolong tinggi.

4. Ketimpangan Ekonomi Wilayah Dalam Ekonomi Islam

Islam dipandang bukan hanya sebagai ajaran agama yang mengatur ibadah ritual, melainkan juga sebagai sistem kehidupan (*way of life*) yang menyeluruh.[29] Ajaran Islam bersifat universal, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari aspek sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu memberikan pedoman dan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk dalam masalah ketimpangan ekonomi.

Seiring berkembangnya studi tentang ekonomi Islam, muncul berbagai pendekatan baru, baik melalui filsafat, pemikiran klasik, maupun kerangka ilmiah modern. Hal ini melahirkan disiplin ekonomi Islam yang fokus mempelajari problematika ekonomi umat dengan landasan nilai-nilai

[29] Sadan, 'Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi', Marifah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Peradaban Islam, 1.2 (2023), pp. 81–98, doi:10.64173/mrf.v1i2.52.

keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan, serta kesejahteraan lahir dan batin (*falah*) bagi manusia.[30]

Mustafa E. Nasution menyoroti bahwa berbagai krisis ekonomi global yang terjadi dalam sistem kapitalis justru memperparah tingkat kemiskinan dan memperlebar jurang ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut sangat terasa di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Islam, di mana sistem kapitalis dengan kebebasan kepemilikan yang tanpa batas cenderung menimbulkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain semakin terpinggirkan.

Berbeda dengan hal itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan hak seluruh anggota masyarakat.[31] Islam memang mengakui adanya hak milik individu, tetapi kepemilikan tersebut bersifat terbatas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata. Kekayaan dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, segala bentuk penumpukan harta tanpa manfaat sosial dipandang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

[30] Aisyah Amelia Purba and others, 'Derivatif : Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2025, p. 6.

[31] Fauzatul Laily Nisa Yoga Permana, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol 5 No 2 Agustus 2024, Issn: 2745-8407*, 5.02 (2024), P. 85.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa orang kaya memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap orang miskin. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana distribusi yang nyata untuk memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan juga tersebar kepada mereka yang membutuhkan. [32] Dengan demikian, sistem ini mendorong terciptanya pemerataan dan mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Berbeda dengan kapitalisme yang menekankan kebebasan penuh dalam kepemilikan, dan sosialisme yang mengutamakan kepemilikan kolektif, Islam menawarkan jalan tengah. Islam mengakui kepemilikan individu, namun memberi batasan moral dan sosial agar penggunaannya tidak menimbulkan ketidakadilan. [33] Dalam konteks ekonomi antarwilayah, prinsip ini berarti bahwa ekonomi tidak boleh hanya terpusat di pusat-pusat kota atau wilayah tertentu saja, tetapi harus terdistribusi secara merata agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah.

Dalam Islam, distribusi kekayaan tidak hanya terbatas pada kepemilikan pribadi, tetapi harus berfungsi untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Islam menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah dalam masyarakat, baik yang sifatnya wajib maupun sukarela. Tujuan utama dari

[32] Eko Sumardianto Sumadi, 'Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9.1 (2025), pp. 93–110, doi:10.46773/imtiyaz.v9i1.1589.

[33] Moh. Nasrul Arief Setiawan Adam, Dewi Indrayani Hamin, and Hasim Hasim, 'Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme Dan Ekonomi Syariah: Sebuah ANalisis Kritis Terhadap Prinsip, Implemnetasi Dan Dampak Sosial', JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 7.2 (2023), pp. 1011–24 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/27698>.

instrumen-instrumen tersebut adalah agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan tersebar secara merata dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh umat.

Secara umum, terdapat tiga instrumen utama yang berperan dalam mengurangi ketimpangan kekayaan masyarakat:

a. Parameter Positif atau Wajib *(Positive Measure)*

Instrumen ini meliputi zakat dan *faraid* (waris) yang keduanya bersifat mengikat bagi setiap muslim. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu.[34] Tujuannya adalah untuk menjamin adanya aliran minimal kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Sedangkan faraid atau pembagian waris, berfungsi untuk memastikan distribusi harta secara adil dalam lingkup keluarga dan kerabat, sehingga tidak ada kekayaan yang hanya menumpuk pada segelintir orang.

Parameter positif ini menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki harta lebih tidak hanya berkewajiban menafkahi dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama. Dalam praktiknya, kewajiban zakat maupun waris akan menjaga agar peredaran kekayaan tetap sehat. Bahkan, meskipun kewajiban ini secara langsung ditujukan kepada orang kaya, Islam tetap menganjurkan seluruh umat untuk saling menolong dalam kebaikan. Memberikan

[34] Muhamad Mu'izz Abdullah and Abdul Bari Awang, 'Wasiat Dan Wisayah : Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim', *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8.1 (2021), pp. 55–74.

sebagian harta kepada orang lain dipandang sebagai bentuk pembersihan harta dari unsur-unsur yang tidak baik (*bathil*), sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

b. Parameter Sukarela (*Voluntary Measure*)

Selain instrumen wajib, Islam juga menyediakan instrumen sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berperan besar dalam mendorong lebih meratanya distribusi kekayaan dalam masyarakat. Infak dan sedekah dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik harta, barang,[35] maupun tenaga, sehingga bersifat lebih fleksibel. Sementara wakaf berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang, karena aset yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, seperti ekonomi fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur sosial.

Instrumen sukarela ini sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan ekonomi daerah.[36] Melalui semangat infak, sedekah, dan wakaf, perputaran harta dapat berlangsung lebih dinamis sehingga tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Pendistribusian harta semacam ini menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung terciptanya pemerataan ekonomi.

c. Parameter Etika dan Moral (*Ethical Measure*)

[35] Winarsa Hari Akbar Asy'ari Muh, 'Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi', *Of Islamic Studies*, 6.1 (2016), p. 27.

[36] Firla Azizah, Nur Wulan Ramdhaniah, and Mohammad Ridwan, 'Peran Zakat, Infak, Dan Sedekah Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan', *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2 (2025), p. 333.

Selain dua instrumen di atas, Islam juga menekankan pentingnya nilai moral dalam perilaku ekonomi. Setiap muslim diajarkan untuk menjauhi praktik yang menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, monopoli, penipuan, atau eksploitasi. Etika Islam mengajarkan bahwa penggunaan harta tidak boleh merugikan orang lain, melainkan harus diarahkan pada kegiatan yang membawa manfaat.[37] Parameter moral ini bertindak sebagai pagar pengaman agar kegiatan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Melalui ketiga instrumen tersebut, Islam berusaha memastikan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, melainkan tersebar secara adil dan merata.[38] Dengan demikian, ketimpangan dapat dikurangi, solidaritas sosial dapat diperkuat, dan tujuan ekonomi dalam Islam, yaitu terciptanya kesejahteraan bersama (*falah*), dapat terwujud.

Islam tidak menuntut adanya persamaan mutlak dalam kepemilikan harta, karena perbedaan kemampuan, usaha, dan rezeki merupakan ketetapan Allah SWT yang bersifat sunnatullah. Namun demikian, Islam menolak keras adanya ketidakadilan distribusi kekayaan yang hanya menguntungkan sekelompok orang kaya, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam kekurangan. Islam menekankan bahwa setiap individu berhak untuk dipenuhi

[37] Ratna Ayu Wijayanti and others, 'Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2024), p. 72.

[38] Emily Nur Saidy Afdhal Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal Syamsurizal, Robby Reza Zulfikri, Mursal Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)

kebutuhan dasarnya, baik berupa pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan pokok lain yang menjamin kelangsungan hidup secara layak.

Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hartanya, membantu fakir miskin, serta menolong orang-orang yang membutuhkan.[39] Prinsip ini tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Konsentrasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu sangat dikecam karena berpotensi menimbulkan kesenjangan, kecemburuan sosial, hingga konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam ajaran Islam agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ﴿٧﴾

Artinya: *"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*."

B. Tinjauan Investasi

[39] Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta : Deepublish, 2018)

1. Definisi Investasi

Beberapa ahli ekonomi memberikan pandangan yang berbeda mengenai definisi investasi, namun pada dasarnya memiliki makna yang sejalan. Menurut Sadono Sukirno, investasi adalah pengeluaran atau penanaman modal oleh sektor usaha maupun pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. [40] Definisi ini menekankan bahwa investasi berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian.[41]

Haming dan Basalamah menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa mendatang. Pemikiran ini memperlihatkan adanya unsur pengorbanan sekarang yang digantikan dengan harapan hasil di waktu depan.

Sementara itu, Sunariyah mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi digambarkan sebagai kegiatan yang berorientasi jangka panjang.

Dari sisi ekonomi makro, Samuelson dan Nordhaus berpendapat bahwa investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan

[40] D Fatihudin, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi* (Yogyakarta : Deepublish, 2019), p 18

[41] Fiby Julianti Zarotun Ikhsan And Others, 'Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan Peran Investasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Menurut Tinjauan Ekonomi Islam', 6.1 2025), Pp. 62–71

peralatan produksi dengan tujuan menambah kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan output barang dan jasa. Definisi ini menekankan peran investasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.[42]

Sedangkan dalam perspektif syariah, para pemikir ekonomi Islam menekankan bahwa investasi adalah aktivitas pengelolaan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal, menjaga keberlanjutan aset, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas. Investasi dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta harus diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan nilai keadilan, keberkahan, dan maslahat.

2. Macam-Macam Investasi

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membedakan investasi ke dalam dua bentuk utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**.** Kedua jenis investasi ini memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus mendorong pemerataan ekonomi wilayah.[43]

a. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal di Indonesia oleh pihak asing untuk menjalankan usaha atau

[42] Gita Tiara Marhayu Putri And Bambang Santoso, 'Sistem Investasi Di Indonesia', Toman: Jurnal Topik Manajemen, 1.2 (2023), Pp. 303–16

[43] Valentina Elaristi Samosir, 'Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General On Trade In Services (GATS)', *Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), p. 14.

kegiatan ekonomi tertentu. PMA dapat berbentuk investasi langsung *(Foreign Direct Investment/FDI)* maupun investasi portofolio.[44] Investasi langsung meliputi pendirian perusahaan baru, ekonomi fasilitas produksi, pengelolaan sumber daya alam, atau ekspansi usaha. Sedangkan investasi portofolio dilakukan melalui pembelian saham atau surat berharga perusahaan di Indonesia.

PMA memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu manfaat utama PMA adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara lebih optimal, sehingga mendorong efisiensi dan produktivitas kegiatan ekonomi. Selain itu, PMA berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberikan tambahan penerimaan negara melalui pajak dan kontribusi lainnya.[45]

PMA juga menjadi sarana transfer teknologi dan manajemen, karena investor asing membawa metode produksi, inovasi teknologi, serta praktik manajerial yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan lokal.[46] Dengan demikian, PMA tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga berdampak positif bagi peningkatan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia di

[44] Kusdianti Fatimah, Vanny Himmatul Amalia, and Endang Kartini Panggiarti, 'Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (2022), pp. 68–76.

[45] Silvia Delvita Ramenggila, Nudiatulhuda Mangun, and Santi Yunus, 'Dampak Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.3 (2025), p. 2778.

[46] Deddy Ibrahim Rauf, 'Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 2.6 (2024), pp. 268–76.

Indonesia.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan aktivitas menanamkan modal di wilayah Indonesia yang bersumber dari kekayaan domestik. Modal ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk individu, perusahaan swasta nasional, atau pemerintah, dengan tujuan untuk menjalankan usaha produktif, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis di dalam negeri. PMDN berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi wilayah karena dapat menstimulasi pertumbuhan wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.

Menurut Harjono, PMDN mencakup pemanfaatan modal domestik yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, baik yang dimiliki oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif.[47] Penggunaan modal ini tidak hanya sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan memaksimalkan potensi internal bangsa. PMDN membantu pengembangan sektor usaha lokal, memperluas lapangan kerja, dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.[48]

3. Tujuan Investasi

[47] Ramenggila, Mangun, and Yunus.

[48] Dewi Masitah, Aris Munandar, and Lalu Suhartana, 'Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal', *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 677–87

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tujuan investasi (Penanaman modal) adalah sebagai berikut:[49]

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2) Menciptakan lapangan kerja.
3) Meningkatkan ekonomi berkelanjutan.
4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill denganmenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dariluar negeri.
8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Teori – Teori Investasi

a. Teori Gunnar Myrdal Mengenai Dampak Balik

Gunnar Myrdal, seorang ekonom Swedia, mengembangkan teori ekonomi wilayah yang menekankan hubungan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Salah satu konsep penting dalam teorinya adalah *Circular and cumulative causation* atau dampak balik.[50] Teori ini menjelaskan bagaimana ketimpangan Ekonomi wilayah dapat terjadi akibat pergerakan sumber daya dari wilayah yang kurang berkembang menuju wilayah yang lebih maju.

[49] Republik Indonesia Tahun, 'UU RI No.25 Tahun 2004', *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2007.
[50] Ridwan and Saprudin.

Menurut Myrdal, wilayah yang lebih maju cenderung menarik sumber daya, termasuk modal, tenaga kerja, dan teknologi, dari wilayah yang kurang berkembang. [51] Misalnya, tenaga kerja terampil atau investor dapat meninggalkan daerah tertinggal untuk bekerja atau menanam modal di daerah yang lebih berkembang. Kondisi ini memperkuat pertumbuhan di wilayah maju, sementara wilayah yang tertinggal semakin kehilangan sumber daya penting untuk Ekonomi wilayah.

Dampak balik ini memiliki beberapa implikasi bagi Ekonomi wilayah:

1) Migrasi tenaga kerja dan modal wilayah tertinggal kehilangan tenaga kerja terampil dan modal yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi lokal.[52]
2) Penguatan konsentrasi ekonomi Aktivitas ekonomi semakin terkonsentrasi di wilayah maju, sehingga ketimpangan wilayah semakin besar.
3) Keterlambatan ekonomi wilayah tertinggal karena sumber daya penting terus berpindah ke wilayah maju, daerah tertinggal mengalami pertumbuhan yang lambat.
4) Efek negatif sosial dan ekonomi ketimpangan ekonomi dapat memicu masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan.

[51] Ridwan and Saprudin.

[52] Moh. Zaini Himawan Arif Sutanto and Syamsidar Sinaga Irmanelly, Abdul Azizs, *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN*.(Naga Pustaka, 2019).47

Myrdal menekankan bahwa pertumbuhan wilayah tidak otomatis merata, melainkan dapat menciptakan siklus penguatan bagi wilayah maju dan kelemahan bagi wilayah tertinggal.[53] Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan Ekonomi wilayah, misalnya melalui redistribusi sumber daya, ekonomi infrastruktur di wilayah tertinggal, atau insentif investasi untuk daerah yang kurang berkembang.

b. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori klasik pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya investasi dan tabungan dalam mendorong pertumbuhan wilayah suatu negara.[54] Teori ini dikembangkan secara terpisah oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada tahun 1930-an dan 1940-an, dengan tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.[55]

Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah pada suatu negara sangat bergantung pada tingkat investasi dan tabungan. Investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja dan memperluas output nasional.[56] Selain itu, tingkat tabungan

[53] Aphrodite M. Sahusilawane Esther Kembauw, Lexy J. Sinay, *Pembangunan Perekonomian Maluku* (Yogyakarta : Deepublish, 2015). p.20

[55] Jana Milia Wendy Liana, Sri Yani Kusumastuti, Darwin Damanik, Dalizanolo Hulu, Apriyanto Apriyanto, Loso Judijanto, Tono Wartono, Suharto Suharto, Fitriyana Fitriyana, Hariyono Hariyono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

[56] Indra Suhendra and Dita Ayu Irawati, 'Pengaruh Tabungan, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6.2 (2016),

yang cukup diperlukan untuk membiayai investasi, sehingga terjadi siklus pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Secara matematis, teori Harrod-Domar dapat dirumuskan sebagai berikut:[57]

$$Y = \text{GNP (Gross National Product)}$$

$$Y\,Y = s\,Y\,k$$

Dimana:

ν ΔY = Tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP

Y (prosentase perubahan GNP)

ν s = Rasio tabungan nasional, prosentase atau ouput nasional yang selalu ditabung

ν k = Rasio modal output, modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan GNP

Dalam konteks ekonomi wilayah, teori Harrod-Domar menekankan bahwa wilayah yang memiliki kapasitas investasi lebih besar cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan wilayah dengan investasi rendah berpotensi tertinggal.[58] Oleh karena itu, investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) memiliki peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membantu pemerataan ekonomi wilayah.

---

pp. 256–75,

[57] DPR RI, 'Teori Harrod-Domar', 1 (2023), p. 3.

[58] Wendy Liana, Sri Yani Kusumastuti, Darwin Damanik, Dalizanolo Hulu, Apriyanto Apriyanto, Loso Judijanto, Tono Wartono, Suharto Suharto, Fitriyana Fitriyana, Hariyono Hariyono. Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya.(Yogyakarta : PT.Son Pedia Publishing, 2024). p 37

c. Model *Interregional Income*

Model Interregional Income merupakan salah satu pendekatan dalam ekonomi regional yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan wilayah.[59] Model ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan pendapatan di satu wilayah dapat memengaruhi wilayah lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui mekanisme aliran sumber daya, perdagangan, dan investasi.[60]

Konsep utama dari model ini adalah hubungan saling kebergantungan wilayah. Setiap wilayah tidak berdiri sendiri dalam perekonomian, melainkan saling terhubung melalui aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.[61] Peningkatan pendapatan di satu wilayah dapat memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah lain melalui permintaan barang dan jasa, transfer teknologi, maupun investasi. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan antara wilayah dapat menyebabkan konsentrasi pertumbuhan di beberapa wilayah saja, sementara wilayah lain tertinggal.

4. Indikator Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi wilayah. Dalam penelitian ini, indikator investasi diukur melalui total nilai investasi yang diperoleh dari

[59] Asnita Frida Sebayang, *Ekonomi Regional*, ed. by

[60] Dika Hasto Muhammad Afif, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018', *Diponegoro Journal of Economics*, 11.3 (2024), pp. 176–86, doi:10.14710/djoe.34841.

[61] Esther Kembauw, Lexy J. Sinay.

penjumlahan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di masing-masing kabupaten/kota.

$$\mathbf{I = PMA + PMDN}$$

Keterangan:

I : total investasi di kabupaten/kota

PMA : nilai investasi asing di kabupaten/kota

PMDN : nilai investasi dalam negeri di kabupaten/kota

5. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan ekonomi wilayah

Investasi, baik dari modal dalam negeri (PMDN) maupun modal asing (PMA), berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi wilayah. Investasi dapat menambah kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, jika investasi hanya terpusat di wilayah tertentu, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan Ekonomi wilayah, di mana beberapa wilayah berkembang pesat sementara wilayah lain tertinggal.

Wilayah yang menerima banyak investasi biasanya memiliki keunggulan, sepertilokasi strategis, infrastruktur yang baik, dan akses pasar yang luas.[62] Akibatnya, modal, tenaga kerja, dan teknologi cenderung mengalir ke wilayah ini. Fenomena ini sejalan dengan teori *Circular and cumulative causation* dari Gunnar Myrdal, yang menyatakan bahwa pemusatan ekonomi di satu wilayah dapat mengambil

[62] Isra Maulana, 'Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar', *Investasi Islam*, 7 (2022), Pp. 5–6

sumber daya dari wilayah lain, sehingga wilayah tertinggal semakin lambat berkembang.

Sebaliknya, jika investasi dialokasikan lebih merata, termasuk ke wilayah yang tertinggal, maka bisa terjadi efek limpahan, yaitu efek positif yang mendorong pertumbuhan wilayah. [63] Wilayah yang sebelumnya kurang berkembang akan mendapatkan akses terhadap teknologi, modal, peluang kerja, dan ekonomi infrastruktur, sehingga kesenjangan ekonomi wilayah dapat berkurang

6. Investasi dalam Ekonomi Islam

Konsep investasi syariah diwujudkan dalam bentuk nonfinansial konsep investasi dalam ajaran Islam tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan tapi juga spriritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.[64] Berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

a. Memiliki akidah yang benar,
b. Ibadah dengan cara yang benar,
c. Memiliki akhlak yang mulia,

[63] Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi* (Siduarjo: Uwais Inspirasi Dunia, 2019). p 53

[64] Afif.

d. Intelektualitas yang memadai,

e. Mampu untuk bekerja atau mandiri,

f. Disiplin atas waktu, Bermanfaat bagi oranglain.

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.[65] Oleh karena itu, investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah : 261)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاَئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: **"***Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini memberikan pemahaman tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termasuk menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfaqkan hartanya dijalan Allah. Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.

[65] Elif Pardiansyah, 'Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920.

C. Konsep Aglomerasi

Aglomerasi adalah konsentrasi aktivitas di suatu wilayah, terutama kegiatan industri. [66] Kawasan yang menjadi pusat aglomerasi mendapat keuntungan seperti pengurangan biaya produksi, ketersediaan tenaga kerja, dan pemanfaatan fasilitas bersama. Meskipun hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, aglomerasi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, karena wilayah di sekitarnya mungkin tidak memperoleh manfaat yang sama.

1. Pengertian Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi wilayah umumnya tidak merata. Beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang tinggi, sedangkan wilayah lain pertumbuhannya rendah.[67] Perbedaan ini, baik dari sisi pendapatan maupun laju pertumbuhan, dapat menyebabkan munculnya aglomerasi, yaitu pemusatan aktivitas ekonomi di satu wilayah tertentu. Aglomerasi ini membuat wilayah pusat menjadi lebih berkembang, sementara wilayah lain tertinggal.

Menurut Montgomery, aglomerasi adalah konsentrasi spasial aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan, yang terjadi karena adanya penghematan biaya akibat lokasi yang berdekatan, yang dikenal sebagai *economies of*

[66] Bima Prasetya Kumara and Cikit Apriyanti, 'Determinasi Aglomerasi Industri Di Sumatera Utara : Pendekatan Hoover Balassa Index Periode 2018 – 2023', 6.1 (2025), pp. 28–42.

[67] Muhammad Yusuf and Jefriyanto Jefriyanto, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau', *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 1.1 (2021), pp. 80–88, doi:10.56870/ambitek.v1i1.8.

proximity.[68] Konsentrasi ini biasanya muncul dalam bentuk klaster, di mana perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen saling berdekatan sehingga dapat menekan biaya transportasi, komunikasi, dan informasi.

Robinson dan Tarigan menambahkan bahwa keuntungan aglomerasi berasal dari dua faktor utama. Pertama, *economic of scale,* yaitu keuntungan dari produksi yang lebih efisien karena adanya spesialisasi tenaga kerja dan proses produksi. Kedua, *economic of agglomeration*, yaitu keuntungan dari lokasi yang menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan kebutuhan yang lengkap bagi perusahaan.[69]

Meskipun aglomerasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat, konsentrasi ini sering menimbulkan ketimpangan ekonomi wilayah. Wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi akan berkembang lebih cepat, sedangkan wilayah yang tidak menjadi pusat cenderung tidak berubah. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal.

2. Indikator Aglomerasi

Untuk mengukur tingkat aglomerasi industri, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Theil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin kuat konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Skala pengukurannya adalah:

a. Nilai > 4 menunjukkan aglomerasi sangat kuat.

[68] Barli Novirin, 'Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pelaksanaannya Di Beberapa Wilayah Indonesia', *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), pp. 60–69, doi:10.53491/oikonomika.v2i1.111.

[69] Yusuf and Jefriyanto.

b. 2–4 aglomerasi sedang.
c. 1–2 aglomerasi lemah
d. 0–1 menunjukkan tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tidak memiliki keunggulan komparatif.

Pengukuran aglomerasi dapat dilakukan melalui:

a. Proporsi jumlah penduduk perkotaan terhadap total penduduk provinsi.
b. Proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi (*aglomerasi produksi*).
c. Proporsi tenaga kerja sektor industri kabupaten/kota terhadap total tenaga kerja industri provinsi.

Penelitian ini menggunakan konsep aglomerasi produksi, yaitu dengan menghitung proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi untuk menilai konsentrasi aktivitas ekonomi. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah. Perhitungan Aaglomerasi yang dirumuskan dengan:

$$\boldsymbol{Ag = \frac{PDRBi}{PDRBtot}}$$

Keterangan :

Ag: Aglomerasi produksi

PDRBi: PDRB Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota i

PDRBtot: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi i

Aglomerasi berarti pemusatan kegiatan ekonomi atau industri di satu wilayah. Wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi biasanya berkembang lebih cepat karena lebih banyak mendapat investasi, tenaga kerja, dan fasilitas pendukung.[70] Sementara itu, wilayah lain yang tidak menjadi pusat cenderung tertinggal. Kondisi seperti ini membuat perbedaan ekonomi wilayah menjadi lebih besar, karena daerah yang sudah maju terus berkembang, sedangkan daerah dengan kegiatan ekonomi rendah berkembang lebih lambat.

3. Pengaruh Aglomerasi terhadap Ketimpangan ekonomi

Aglomerasi merupakan pemusatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu, terutama di sektor industri dan perdagangan.[71] Wilayah yang menjadi pusat aglomerasi biasanya menarik lebih banyak investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur, sehingga aktivitas ekonominya berkembang lebih cepat dibanding wilayah lain. Konsentrasi ini juga menciptakan efisiensi bagi perusahaan karena adanya fasilitas bersama, pasar yang lebih besar, dan tenaga kerja yang terampil.

Di sisi lain, wilayah yang tidak menjadi pusat aglomerasi sering kali tertinggal karena memiliki aktivitas ekonomi yang lebih rendah, investasi yang sedikit, dan akses terhadap fasilitas yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan wilayah tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Semakin besar konsentrasi kegiatan ekonomi di satu

[70] Ridwan and Saprudin.
[71] Ridwan and Saprudin.

wilayah, semakin cepat pertumbuhan wilayah tersebut, sementara wilayah lain mengalami perkembangan yang lebih lambat.

Selain itu, aglomerasi dapat memperkuat dominasi wilayah tertentu dalam hal ekonomi dan sosial. Wilayah pusat aglomerasi cenderung menjadi magnet bagi tenaga kerja dan modal, sedangkan wilayah pinggiran atau pedesaan sering kehilangan kesempatan untuk berkembang. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan publik.

Dengan demikian, meskipun aglomerasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu, fenomena ini juga memperlebar ketimpangan ekonomi.[72] Oleh karena itu, perencanaan ekonomi perlu memperhatikan pemerataan distribusi kegiatan ekonomi agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah.

4. Aglomerasi dalam Ekonomi Islam

Aglomerasi merupakan fenomena pemusatan kegiatan ekonomi, khususnya industri dan perdagangan, di suatu wilayah tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam, ekonomi tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan masyarakat.[73] Islam menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi harus tersebar secara adil agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, aglomerasi harus dilihat bukan hanya dari sisi

[72] Listya Okta Efendi, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Ketimpangan Antarwilayah', *Circle Archive*, 3.8 (2025), pp. 1–7.

[73] Amsari, Harahap, and Nawawi.

efisiensi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ketimpangan ekonomi wilayah akibat aglomerasi dapat dikurangi melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Distribusi kekayaan melalui instrumen syariah, seperti zakat, sedekah, infaq, dan wakaf. Instrumen ini membantu menyalurkan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu, sehingga manfaat pertumbuhan wilayah terpusat aglomerasi dapat dirasakan lebih luas.
b. Pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dengan cara ini, wilayah pinggiran dapat ikut berpartisipasi dalam proses ekonomi wilayah.
c. Prinsip keadilan sosial (*adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*), yang menekankan bahwa ekonomi wilayah harus menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Dengan pendekatan ini, ekonomi wilayah dapat berjalan lebih seimbang, sekaligus meminimalkan ketimpangan ekonomi wilayah yang diakibatkan oleh aglomerasi. Wilayah pusat tetap dapat berkembang secara optimal, tetapi keuntungan ekonomi juga mengalir ke wilayah lain melalui distribusi kekayaan dan penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Secara praktis, prinsip ekonomi Islam mendorong ekonomi wilayah di mana konsentrasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan sebagian wilayah tertinggal. Aglomerasi dalam konteks ekonomi Islam harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan pemerataan akses terhadap investasi, pekerjaan, dan fasilitas ekonomi, sehingga pertumbuhan tidak hanya cepat di satu titik, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh wilayah dan masyarakat secara adil. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah: 22).

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan bersama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan berfungsi sebagai acuan bagi penelitian ini, sehingga memudahkan peneliti dalam merancang dan mengaplikasikan penelitiannya. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dalam metode penelitian, yaitu

menggunakan pendekatan kuantitatif dan membahas mengenai ketimpangan ekonomi, meskipun objek penelitiannya berbeda.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan ekonomi konvensional, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam dan memfokuskan pada variabel yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023, serta menganalisis pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi, yaitu investasi, dan aglomerasi, dengan pendekatan ekonomi Islam. Pendekatan ini menekankan pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan sebagai bagian dari ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Mikhael Simalango, Ririt Iriani Sri Setiawati	Analisis Faktor yang Memperngaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbang Kertosusila	Kuantitatif	Aglomerasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
2	Nurhayani, Siti Hodijah, Adi Bhakti	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Investasi Di Provinsi Jambi	Kuantitatif	Provinsi Jambi tergolong menegah Berdasarkan hasil uji korelasi Person menunjukkan hubungun yang cukup lemah antara variabel disparitas dengan

		Tahun 2002-2014		PMDN, dengan arah positif, peningkatan PMA menyebabkan peningkatan disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, namun, berdasarkan nilai signifikansi hasilnya tidak ada korelasi antara PMDN dan PMA.
3	Monikasari, Yulistia Devi Ghina Ulfah, Saefurrohman,	Analisis Pengaruh PDRB, Investasi & PAD Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2018-2023)	Kuantitatif deskriptif	Variabel PDRB memiliki pengaruh secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, namun tidak memiliki pengaruh secara parsial. Di Provinsi Lampung, variabel investasi dan PAD memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
4	Mario Andrias Kiton	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara	Kuantitatif	Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi yang diteliti benar dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15 persen, sedangkan 12.85 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (yang tidak diteliti).
5	Liling Vera Yusica, Nazaruddin Malik, Zaenal	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,	Kuantitatif	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan

	Arifin	Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur		wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

E. Kerangka Pemikiran

Masalah ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini juga terlihat di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Ekonomi wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masalah utama ekonomi wilayah di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023 masih berkaitan dengan ketimpangan wilayah.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Daerah yang semakin berkembang akan mampu menarik lebih banyak investasi, terutama dari sektor swasta. Teori Myrdal menjelaskan bahwa ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang menekankan pada motif laba. Wilayah yang memiliki prospek keuntungan tinggi akan berkembang pesat karena menjadi tujuan utama investasi. Sebaliknya, wilayah yang kurang menarik bagi investor akan semakin tertinggal sehingga memperlebar ketimpangan ekonomi wilayah.

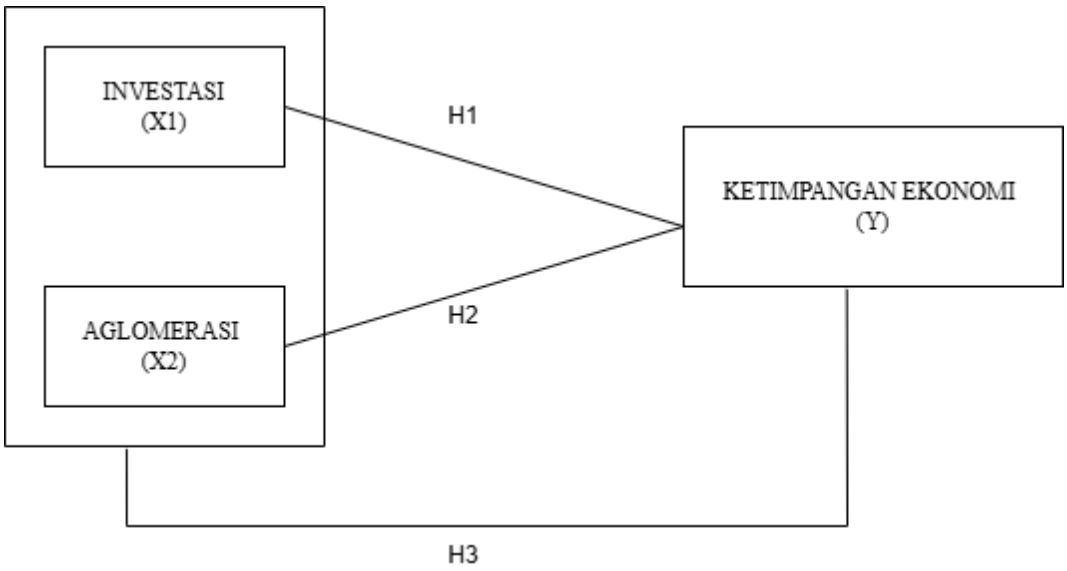
Selain itu, aglomerasi juga berperan dalam ekonomi wilayah suatu daerah. Pemusatan kegiatan dalam suatu wilayah dapat menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi, aglomerasi juga berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi wilayah. Daerah dengan tingkat aglomerasi rendah akan semakin tertinggal, sehingga aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi wilayah.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, ketimpangan ekonomi wilayah terjadi karena distribusi yang tidak merata. Pemerataan Ekonomi wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali tidak diiringi dengan pengalokasian tenaga kerja yang tepat. Hal ini dapat menimbulkan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, ekonomi menurut pandangan Islam menekankan keadilan distribusi, pemerataan kesempatan, serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan ekonomi sebagai variabel terikat (Y).
2. Investasi (PMA dan PMDN) 2018–2023 sebagai variabel independen (X_1).
3. Aglomerasi 2018–2023 sebagai variabel independen X_2).

Selanjutnya, hubungan antarvariabel tersebut akan diuji menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap Ketimpangan ekonomi wilayah di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023

Gambar Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan analisis empiris. Keberadaan hipotesis berfungsi untuk mengarahkan peneliti agar proses penelitian berjalan secara sistematis dan fokus sesuai variabel yang ditetapkan. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang kemudian diuji melalui metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka hipotesis sebagai berikut.

1. **Pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.**

   Mengacu pada teori Myrdal, ketidakmerataan ekonomi yang memicu ketimpangan ekonomi terjadi karena adanya dampak sebab akibat *(circular and cumulative caution).* Sebab akibat ini muncul ketika arus sumber daya

seperti tenaga kerja, modal, dan investasi lebih terpusat ke wilayah maju sehingga menghambat perkembangan wilayah tertinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya sebab akibat adalah investasi, dimana masuknya arus investasi ke wilayah tertentu justru dapat memperlebar jurang ketimpangan antar daerah.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Nurhayani, Siti Hodijah, dan Adi Bhakti dalam judul Analisis Ketimpangan ekonomi wilayah Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hubungan antara ketimpangan ekonomi wilayah dan PMDN tergolong lemah dengan arah hubungan positif, yang berarti peningkatan investasi khususnya PMA justru meningkatkan ketimpangan ekonomi wilayah ekonomi di Provinsi Jambi. Namun demikian, nilai signifikansi model menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara PMDN dan PMA terhadap ketimpangan ekonomi wilayah ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga investasi belum mampu menjadi faktor pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian teori dan temuan penelitian terdahulu terkait pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_0: Investasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.

H_1: Investasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.

2. Pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 secara parsial.

Selain investasi, konsentrasi kegiatan ekonomi *(economic concentration)* juga menjadi faktor yang mendorong ketimpangan regional. Berdasarkan pandangan teori Neo Klasik, aglomerasi muncul sebagai respon pelaku ekonomi dalam memaksimalkan keuntungan melalui ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi, yang menyebabkan konsentrasi industri dan aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Tingginya tingkat aglomerasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan spasial ketika wilayah pusat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pinggiran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Liolyta Damayanti dalam karya berjudul "Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan ekonomi". Hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan aglomerasi industri secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. Artinya, aglomerasi justru menciptakan *spread effect,* yaitu efek penyebaran yang mampu memperbaiki distribusi ekonomi antar wilayah sehingga ketimpangan dapat ditekan.

H_0: Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

tahun 2018-2023 secara parsial.

H_2: Aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 secara parsial.

3. **Pengaruh investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 secara simultan.**

Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam serta perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana ekonomi antarwilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses ekonomi menjadi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan kekayaan daerah inilah yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju *(developed region)* dan wilayah terbelakang *(underdeveloped region).*

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas Andini, Erfit, dan Edi Bhaktiar dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi di Wilayah Sumatera Tahun 2011–2015" menemukan bahwa berdasarkan hasil regresi data panel, variabel investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ferry Kurniawan Lubis dengan judul "Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 1990–2013". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi yang diteliti benar dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15 persen, sedangkan 12.85 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (yang tidak diteliti).

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara investasi, dan aglomerasi secara simultan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0: Investasi, dan aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 secara simultan.

H_3: Investasi, dan aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 secara simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan peneliti dalam suatu kegiatan penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode ini berfungsi sebagai pedoman yang sistematis agar proses penelitian berjalan terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Kepustakaan *(Library Research*)

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ketimpangan ekonomi.[74] Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang dikaji berupa data numerik (angka) yang bersifat diskrit (utuh) maupun kontinyu (pecahan/interval).

   Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2018–2023. Data yang digunakan meliputi investasi, aglomerasi, serta ketimpangan ekonomi wilayah pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis yang dipakai adalah metode data panel, yaitu gabungan antara data *time series* (periode enam tahun, 2018–2023) dan *data cross section* (19

[74] Mahanum Mahanum, 'Tinjauan Kepustakaan', *ALACRITY : Journal of Education*, 1.2 (2021), pp. 1–12, doi:10.52121/alacrity.v1i2.20.

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan ekonomi wilayah di Provinsi Sumatera Barat

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat periode 2018–2023**.**

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dengan cakupan 19 kabupaten/kota sebagai objek kajian, karena daerah ini memiliki data yang relevan mengenai investasi, aglomerasi, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah**.** Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, dengan menggunakan data sekunder tahun 2018–2023.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diterbitkan oleh lembaga resmi, sehingga bisa langsung digunakan tanpa harus dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data ini umumnya telah dihimpun, diolah, dan kemudian

dipublikasikan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau peneliti lain

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, lalu ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh laporan data mengenai investasi, aglomerasi, dan Ketimpangan ekonomiwilayah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, sampelnya adalah data selama enam tahun, yaitu periode 2018–2023.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.
2. Periode data yang digunakan mencakup tahun 2018–2023, sesuai dengan rentang waktu penelitian.
3. Cakupan wilayah meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Variabel penelitian yang digunakan yaitu:
    a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sebagai indikator Ketimpangan ekonomiwilayah.
    b. Investasi, yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagai faktor yang

memengaruhi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

c. Aglomerasi ekonomi, yang diukur berdasarkan proporsi PDRB wilayah terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Barat, sebagai indikator konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah.
    1) Data yang dipilih merupakan data yang lengkap, konsisten, dan terpublikasi resmi selama periode penelitian.
    2) Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak tersedia untuk periode tertentu tidak dimasukkan dalam analisis.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai bagaimana setiap variabel penelitian diukur, diamati, atau diinterpretasikan berdasarkan indikator-indikator tertentu.[75] Definisi ini berfungsi untuk memperjelas batasan konsep sehingga variabel dapat diteliti secara nyata dan menghasilkan data yang terukur. Dengan adanya definisi operasional, peneliti dapat memastikan bahwa setiap variabel memiliki arti yang jelas, konsisten, dan dapat diuji sesuai tujuan penelitian. m penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent).

1. Variabel Terikat (Dependen)

    Variabel terikat adalah variabel yang diukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel lain terhadapnya. Variasi atau perubahan pada variabel terikat terjadi sebagai akibat perubahan variabel bebas.

[75] Wulan Octi Prati Loso Judijanto, Fahrul Agus, Eka Siskawati, Muhammad Ansar, Renny Threesje Tumober, Albert Lumbu, Vandan Wiliyanti, Riky Rizki Junaidi, Selfiana Selfiana, 'METODE PENELITIAN ILIMIAH', *Sonpedia Jambi*, 2025, p. 29

a. Ketimpangan ekonomi wilayah (Y)

Ketimpangan ekonomi wilayah adalah perbedaan distribusi ekonomi antarwilayah secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ekonomi tidak merata di wilayah tertentu.

$$IW = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_i (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^{n} f_i}}}{\bar{Y}}$$

IW: Indeks Williamson

Y_i : Pendapatan per kapita

$\bar{Y}$: Rata-rata pendapatan per kapita nasional (bisa tertimbang)

f_i : Jumlah penduduk

n: Jumlah wilayah

Data bersumber dari data BPS yaitu Pendapatan per kapita wilayah Sumatera Barat Tahun 2018-2023, data Jumlah penduduk wilayah Sumatera barat Tahun 2018-2023.

b. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari:

1) Investasi (X2)

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang bertujuan untuk mengganti, menambah, atau meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa. Investasi ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta, dalam bentuk PMDN (Penanaman Modal

Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing).

$$\mathrm{I} = \mathrm{PMA} + \mathrm{PMDN}$$

Keterangan:

I : Total investasi di kabupaten/kota

PMA : Nilai investasi asing di Kabupaten/Kota

PMDN:Nnilai investasi dalam negeri di Kabupaten/Kota

Data bersumber dari data BPS yaitu Data realisasi investasi asing dan realisasi investasi dalam negeri di kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2018-2023.

c. Aglomerasi (X3)

Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan ekonomi, seperti industri-industri, dalam suatu wilayah yang dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Data yang Aglomerasi yang dirumuskan dengan:

$$\boldsymbol{Ag = \frac{PDRBi}{PDRBtot}}$$

Keterangan :

Ag : Aglomerasi produksi

PDRB : PDRB Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota

PDRB : Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Data bersumber dari data BPS yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2018-2023 dan Data Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018-2023.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan topik penelitian. Dari bahan bacaan tersebut, penulis menyaring informasi yang relevan lalu menggunakannya sebagai dasar teori dalam penelitian. Dalam hal ini, studi pustaka membantu penulis untuk memahami teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan ketimpangan ekonomi antarwilayah di Sumatera Barat.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah investasi (PMA dan PMDN), dan aglomerasi, sedangkan variabel terikatnya adalah Ketimpangan ekonomiwilayah. Analisis regresi linier berganda dipilih karena mampu menunjukkan arah hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, sekaligus memungkinkan penggunaan lebih dari satu variabel independen dalam satu model analisis.

1. Uji Klasik

Uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat analisis yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain:

a. Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel bebas. Dalam penelitian ini, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) digunakan sebagai indikator; jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.
b. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari satu periode atau unit pengamatan berkorelasi dengan residual periode atau unit sebelumnya. Model regresi yang baik tidak memiliki masalah autokorelasi. Keputusan pengujian didasarkan pada *ObsR-squared* jika nilai lebih besar dari 0,05, asumsi autokorelasi terpenuhi.
c. Uji heteroskedastisitas memeriksa apakah varians residual sama di seluruh pengamatan. Heteroskedastisitas biasanya lebih sering muncul pada data cross section. Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Jika t-statistik kurang dari t-tabel atau probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel, yaitu teknik Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Model ini dipilih karena jumlah unit cross section (kabupaten/kota) relatif besar sedangkan periode waktunya lebih pendek, serta data *cross section* tidak diambil secara acak sehingga perlu mempertimbangkan pengaruh spesifik dari masing-masing kabupaten/kota. Persamaan regresi panel yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{Yi} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_1} + \boldsymbol{\beta_2 X_2} + \boldsymbol{\varepsilon \mathbf{i}, \mathbf{t}}$$

Dimana:

Y = ketimpangan ekonomi wilayah pada kabupaten/kota ke-

X_1= investasi (PMA dan PMDN)

X_2 = aglomerasi

β0 = konstanta model

β_1, β_2, = koefisien regresi masing-masing variabel bebas

εi = residual atau error

Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta menjelaskan dinamika perubahan yang terjadi selama periode 2018–2023 di Sumatera Barat secara lebih akurat.

2. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diuji melalui penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengarahkan analisis data dan menentukan apakah hubungan yang diasumsikan benar atau tidak berdasarkan bukti empiris. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan untuk mengetahui pengaruh, investasi, dan aglomerasi terhadap Ketimpangan ekonomiwilayah.

a. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini

menunjukkan pengaruh investasi, dan aglomerasi secara individual terhadap Ketimpangan ekonomiwilayah. Hasil uji t memperlihatkan apakah pengaruh tiap variabel bebas signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas (sig), di mana jika sig lebih besar dari 0,05, hipotesis nol diterima yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Sebaliknya, jika sig kurang dari 0,05, hipotesis nol ditolak yang berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial.

b. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kombinasi investasi, dan aglomerasi secara bersamaan mampu menjelaskan variasi Ketimpangan ekonomiwilayah. Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung lebih besar dari Ftabel, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti secara bersamaan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel, hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak, yang berarti secara bersamaan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa

variabel bebas dapat menjelaskan hampir seluruh variasi variabel terikat, sehingga model regresi sangat baik dalam memprediksi Ketimpangan ekonomi wilayah. Sebaliknya, nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat terbatas, sehingga model kurang optimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Visi dan Misi

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, ibu kotanya terletak di Kota Padang. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau, di sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu.

Adapun Visi Provinsi Sumatera Barat adalah Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan. Sedangkan Misi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global (cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan inovatif).
b. Meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian dan hilirisasinya serta pengelolaan sumbar daya alam *berbasin green economy* dan *blue economy.*
c. Mingkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Melaksanakan akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan dan tangketimpangan bencana.
d. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

Kitabullah".

e. Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.
f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan provinsi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas (*good governace* dan *clean goverment*).
g. Memperkuat pemberdayaan nagari/desa, perempuan, generasi muda (milenial, Gen Z) dan penyandang disabilitas.

2. Sejarah Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan administrasi pemerintahan di wilayah barat Pulau Sumatera. Sejarah Sumatera Barat bermula pada masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), ketika wilayah pesisir barat Sumatera dikenal dengan sebutan *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust*. Wilayah administratif ini pada abad ke-18 berkembang dan mencakup daerah pantai barat Sumatera dari Barus hingga Inderapura.

Seiring dengan runtuhnya Kerajaan Pagaruyung dan terjadinya Perang Paderi yang melibatkan pemerintah kolonial Belanda, wilayah pedalaman Minangkabau mulai dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari kebijakan Pax Nederlandica. Pada masa tersebut, wilayah Minangkabau dibagi ke dalam dua wilayah administrasi, yaitu *Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden.*

Pada tahun 1905, wilayah Tapanuli mengalami perubahan status

menjadi Residentie Tapanuli, sedangkan wilayah Singkil diserahkan kepada Residentie Atjeh. Selanjutnya, pada tahun 1914, Gouvernement Sumatra's Westkust berganti nama menjadi Residentie Sumatra's Westkust dengan penambahan wilayah Kepulauan Mentawai di Samudera Hindia sebagai bagian dari wilayah administrasinya.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera dengan ibu kota di Bukittinggi. Dalam perkembangannya, Sumatera Barat bersama Provinsi Riau dan Jambi tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah kemudian dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya termasuk dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten tersendiri dalam Provinsi Jambi, sedangkan wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/G/PD/1958 tanggal 29 Mei 1958, ibu kota Provinsi Sumatera Barat secara resmi dipindahkan ke Kota Padang. Perubahan administratif tersebut menjadi dasar terbentuknya wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dikenal hingga saat ini.

3. Geografi Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dan memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas dataran rendah

di sepanjang pantai barat serta dataran tinggi vulkanik yang terbentuk oleh rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar 42.297,30 km² atau setara dengan 2,17 persen dari total luas wilayah Indonesia. Dari total luas wilayah tersebut, lebih dari 45,17 persen masih berupa kawasan hutan lindung yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Seluruh garis pantai Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dengan wilayah perairan laut seluas sekitar 186.580 km². Selain wilayah daratan utama, Provinsi Sumatera Barat juga mencakup Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia.

Secara klimatologis, Provinsi Sumatera Barat memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 22,6 °C hingga 31,5 °C. Provinsi ini dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di wilayah Bonjol, Kabupaten Pasaman, yang memengaruhi kondisi iklim dan curah hujan sepanjang tahun. Dari wilayah pegunungan di Sumatera Barat berhulu sejumlah sungai besar yang mengalir ke pantai timur Pulau Sumatera, antara lain Sungai Batang Hari, Sungai Siak, Sungai Inderagiri (dikenal sebagai Batang Kuantan di bagian hulu), dan Sungai Kampar. Selain itu, terdapat pula sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat, seperti Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Kondisi topografi Provinsi Sumatera Barat ditandai oleh keberadaan banyak gunung dan danau. Terdapat sekitar 29 gunung yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dengan Gunung Kerinci yang terletak di

wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi dengan ketinggian sekitar 3.085 meter di atas permukaan laut. Selain Gunung Kerinci, terdapat pula beberapa gunung berapi aktif, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sejumlah danau, di antaranya Danau Singkarak yang merupakan danau terluas, terletak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, serta Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Selain itu, di Kabupaten Solok terdapat Danau Talang dan Danau Kembar, yang dikenal sebagai Danau Di Atas dan Danau Di Bawah.

Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam wilayah rawan bencana alam, khususnya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi ini disebabkan oleh letaknya yang berada pada jalur Patahan Semangko serta di antara pertemuan dua lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, wilayah Sumatera Barat mengalami sejumlah kejadian bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa di beberapa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerawanan bencana di Provinsi Sumatera Barat dan pentingnya upaya perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun

2018 hingga 2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan metode fixed effect model. Sebelum melakukan analisis, penting untuk meninjau gambaran umum mengenai perkembangan ketimpangan ekonomi, investasi, dan aglomerasi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023. Gambaran ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana pembangunan ekonomi daerah berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

a. Ketimpangan ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini terjadi karena perbedaan karakteristik antarwilayah, sehingga beberapa wilayah lebih maju atau unggul dibandingkan wilayah lainnya.

Dalam pembahasan ini, akan diperhatikan perkembangan rendah atau tingginya ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023. Data yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi adalah data rasio gini kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan perhitungan ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat menggunakan Indeks Rasio Gini diperoleh indeks ketimpangan Pendapatan untuk periode 2018–2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018-2023 (dalam desimal)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,306	0,336	0,273	0,321	0,233	0,259
2	Pesisir Selatan	0,255	0,246	0,264	0,253	0,246	0,259
3	Solok	0,303	0,285	0,277	0,246	0,243	0,235
4	Sijunjung	0,3	0,293	0,269	0,27	0,243	0,263
5	Tanah Datar	0,288	0,278	0,273	0,25	0,251	0,26
6	Padang Pariaman	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245	0,257
7	Agam	0,257	0,251	0,278	0,272	0,298	0,255
8	Lima Puluh Kota	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194
9	Pasaman	0,266	0,33	0,31	0,248	0,23	0,243
10	Solok Selatan	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271
11	Dharmasraya	0,264	0,278	0,28	0,268	0,287	0,291
12	Pasaman Barat	0,29	0,283	0,258	0,261	0,277	0,238
13	Kota Padang	0,344	0,312	0,312	0,343	0,354	0,312
14	Kota Solok	0,296	0,271	0,286	0,277	0,288	0,256
15	Kota Sawah Lunto	0,31	0,289	0,3	0,295	0,314	0,308
16	Kota Padang Panjang	0,29	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273
17	Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255
18	Kota Payakumbuh	0,302	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316
19	Kota Pariaman	0,316	0,3	0,31	0,301	0,272	0,289
Maksimal		0,394					
Minimal		0,194					
Rata-rata		0,280894737					
Standar Deviasi		0,03162148					

(Sumber Badan Pusat Statistik 2025)

Ketimpangan Ekonomi digunakan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan di provinsi Sumatera Barat yaitu dengan menggunakan perhitungan Indeks Rasio Gini, nilai angka Indeks yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut:

$G = 0$ Pendapatan merata sempurna

$0 < G < 0{,}3$ Distribusi pendapatan relatif merata

$0{,}3 \leq G < 0{,}5$ Ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah

$0{,}5 \leq G < 1$ Ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi

$G = 1$ Ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna

Ketimpangan pendapatan berdasarkan Indeks Gini di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,394, nilai minimum 0,194, dengan rata-rata 0,2809 dan standar deviasi 0,0316. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah berada pada kategori rendah hingga sedang.

Tabel 4.1 Gibi Ratio berdasarkan Indeks Gini tahun 2018–2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarwilayah relatif terkendali, meskipun terdapat perbedaan antara wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten yang didominasi wilayah pedesaan seperti Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, dan Dharmasraya memperlihatkan nilai Rasio Gini yang relatif stabil di bawah 0,30, yang menandakan tingkat

pemerataan pendapatan yang cukup baik. Selain itu, beberapa wilayah seperti Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, serta Kota Padang Panjang menunjukkan kecenderungan meningkatnya pemerataan pendapatan selama periode pengamatan.

Sebaliknya, wilayah perkotaan seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto cenderung memiliki nilai Rasio Gini yang lebih tinggi, berada pada kisaran 0,31–0,35. Meskipun masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan relatif lebih besar dibandingkan kabupaten. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi di perkotaan berkontribusi terhadap distribusi pendapatan yang kurang merata dibandingkan wilayah pedesaan.

b. Investasi

Penyaluran investasi merupakan faktor penting dalam pembangunan wilayah. Investasi yang masuk, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, dapat memengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota. Investasi yang dimaksud terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan pembangunan yang relatif meningkat selama periode 2018–2023. Pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan ini akan menarik minat para investor, khususnya

pihak swasta, untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal, wilayah yang lebih maju cenderung mengalami peningkatan permintaan yang merangsang investasi, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, motif laba yang menjadi dasar investasi menyebabkan pembangunan ekonomi cenderung terpusat pada wilayah yang menjanjikan keuntungan tinggi, sehingga wilayah lain menjadi kurang berkembang.

Berikut ini disajikan tabel realisasi investasi PMDN dan PMA di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023:

Tabel 4.2

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (dalam desimal)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,024	0,015	0,016	0,016	0,029	0,012
2	Pesisir Selatan	0,424	0,186	0,195	0,195	0,156	0,015
3	Solok	0,032	0,069	0,057	0,057	0,090	0,014
4	Sijunjung	0,053	0,133	0,024	0,024	0,141	0,256
5	Tanah Datar	0,004	0,021	0,004	0,004	0,012	0,016
6	Padang Pariaman	0,248	0,252	1,197	0,996	0,344	1,199
7	Agam	0,354	0,138	0,035	0,035	0,085	0,377
8	Lima Puluh Kota	0,009	0,054	0,255	0,255	0,283	0,283
9	Pasaman	0,001	0,039	0,001	0,001	0,024	0,066
10	Solok Selatan	0,571	0,412	0,827	0,827	0,252	0,236
11	Dharmasraya	0,036	0,016	0,014	0,014	0,334	0,879
12	Pasaman Barat	0,377	0,315	0,037	0,037	0,225	0,072
13	Kota Padang	0,339	1,436	0,484	0,484	0,520	0,609
14	Kota Solok	0,002	0,009	0,004	0,004	0,013	0,022
15	Kota Sawah Lunto	0,000	0,011	0,000	0,003	0,113	0,213
16	Kota Padang Panjang	0,004	0,014	0,027	0,027	0,012	0,010
17	Kota Bukittinggi	0,011	0,055	0,016	0,016	0,003	0,013
18	Kota Payakumbuh	0,000	0,010	0,008	0,008	0,017	0,058
19	Kota Pariaman	0,002	0,000	0,033	0,033	0,002	0,002
Total		**2,490**	**3,184**	**3,232**	**3,033**	**2,655**	**4,351**

Maksimum	1,436
Minimum	0,000
Rata-rata	0,166
Standar Deviasi	0,275

(Sumber: Data BPS 2018-2023)

c. Aglomerasi

Aglomerasi di suatu wilayah terjadi karena pelaku ekonomi berusaha memperoleh keuntungan dari penghematan aglomerasi, baik berupa penghematan urbanisasi maupun penghematan lokalisasi, dengan menempatkan kegiatan ekonomi pada lokasi yang saling berdekatan. Terjadinya aglomerasi memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari aglomerasi antara lain berkembangnya industri-industri, terbentuknya industri baru, tersedianya layanan jasa dan hiburan, serta perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit yang lebih rendah.

Sebaliknya, dampak negatif yang muncul jika tingkat aglomerasi rendah adalah wilayah tertentu menjadi kurang berkembang, sehingga manfaat positif dari aglomerasi tidak dapat diperoleh oleh daerah tersebut. Untuk mengetahui perkembangan tingkat aglomerasi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Aglomerasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (dalam desimal)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	0,0565	0,0569	0,0613	0,0608	0,0607	0,0602
2	Pesisir Selatan	0,0340	0,0342	0,0323	0,0326	0,0322	0,0319
3	Solok	0,0409	0,0411	0,0401	0,0400	0,0396	0,0397

4	Sijunjung	0,0436	0,0433	0,0449	0,0449	0,0446	0,0446
5	Tanah Datar	0,0422	0,0426	0,0404	0,0404	0,0399	0,0399
6	Padang Pariaman	0,0594	0,0578	0,0481	0,0471	0,0503	0,0517
7	Agam	0,0471	0,0472	0,0445	0,0445	0,0441	0,0441
8	Lima Puluh Kota	0,0459	0,0461	0,0468	0,0466	0,0459	0,0460
9	Pasaman	0,0359	0,0357	0,0346	0,0346	0,0339	0,0338
10	Solok Selatan	0,0372	0,0366	0,0352	0,0349	0,0344	0,0342
11	Dharmasraya	0,0482	0,0467	0,0518	0,0518	0,0521	0,0518
12	Pasaman Barat	0,0402	0,0390	0,0409	0,0406	0,0405	0,0404
13	Kota Padang	0,0735	0,0739	0,0789	0,0790	0,0787	0,0787
14	Kota Solok	0,0641	0,0641	0,0637	0,0635	0,0632	0,0629
15	Kota Sawah Lunto	0,0660	0,0665	0,0649	0,0652	0,0660	0,0663
16	Kota Padang Panjang	0,0724	0,0729	0,0714	0,0715	0,0711	0,0710
17	Kota Bukittinggi	0,0747	0,0748	0,0823	0,0825	0,0832	0,0835
18	Kota Payakumbuh	0,0551	0,0566	0,0566	0,0577	0,0580	0,0577
19	Kota Pariaman	0,0632	0,0637	0,0613	0,0617	0,0615	0,0616
Maksimal		0,0835					
Minimal		0,0319					
Rata-rata		0,0526					
Standar Deviasi		0,01430215					

(Sumber Data BPS 2025 Diolah)

Statistik deskriptif aglomerasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,0835, nilai minimum 0,0319, dengan rata-rata 0,0526 dan standar deviasi 0,0143. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menandakan terajdi ketimpangan aglomerasi, namun tetap memperlihatkan perbedaan yang nyata antara daerah perkotaan dan kabupaten.

Data aglomerasi periode 2018–2023 memperlihatkan adanya ketimpangan yang jelas antara wilayah kota dan kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat. Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto secara konsisten mencatat nilai aglomerasi tertinggi, berada pada kisaran 0,07–0,09, yang mencerminkan tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di wilayah perkotaan. Sebaliknya, sebagian besar wilayah kabupaten seperti Pesisir Selatan, Pasaman, dan Solok Selatan memiliki nilai aglomerasi yang relatif rendah, yaitu pada kisaran 0,03–0,04, serta menunjukkan kecenderungan stagnan selama periode pengamatan.

Perbedaan tersebut mencerminkan ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah, di mana proses aglomerasi masih terpusat di kota-kota besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyebaran pertumbuhan (*spread effect*) belum berjalan secara optimal. Sebaliknya, beberapa wilayah justru mengalami penarikan sumber daya ekonomi menuju daerah yang lebih maju (*circular and cumulative causation*), baik dalam bentuk tenaga kerja, modal, maupun aktivitas produksi. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, yang apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan, berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

B. Hasil Analisis Statistik

1. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel

bebas dalam penelitian terlalu mirip atau saling berkaitan erat. Kalau variabel-variabel itu terlalu mirip, hasil analisis bisa kurang akurat, karena model kesulitan untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.063022
X2	-0.063022	1.000000

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel inketimpangan ekonomi X_1 dan X_2 sebesar −0,063022. Nilai korelasi tersebut sangat kecil dan jauh di bawah batas umum 0,80 yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X_1 dan X_2 sangat lemah, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, masing-masing variabel inketimpangan ekonomi dapat digunakan dalam model karena tidak saling memengaruhi secara kuat satu sama lain.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat hubungan antara kesalahan (error) pada suatu periode atau lokasi dengan kesalahan pada periode atau lokasi

sebelumnya. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan model "menempel" dari satu observasi ke observasi berikutnya.

Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi, maka model regresi yang digunakan dianggap layak dan dapat dipercaya. Dalam pengujian ini, digunakan kriteria Obs R-squared. Jika ObsR-squared < 0,05 asumsi autokorelasi ditolak (ada autokorelasi). Jika Obs R-squared > 0,05 asumsi autokorelasi diterima (tidak ada autokorelasi). Hasil pengolahan data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: D(Y) Method: Panel Least Squares Date: 12/30/25 Time: 11:35 Sample (adjusted): 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005922	0.002957	-2.002606	0.0482
D(X1)	0.000676	0.012341	0.054769	0.9564
D(X2)	0.834263	0.623083	1.338927	0.1839
R-squared	0.019493	Mean dependent var		-0.006084
Adjusted R-squared	-0.001822	S.D. dependent var		0.028690
S.E. of regression	0.028716	Akaike info criterion		-

			4.231667
Sum squared resid	0.075863	Schwarz criterion	-4.151018
Log likelihood	204.0042	Hannan-Quinn criter.	-4.199078
F-statistic	0.914509	Durbin-Watson stat	2.799959
Prob(F-statistic)	0.404325		

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, diperoleh nilai DW sebesar 2,799959. Jika dibandingkan dengan batas kritis, yaitu dL = 1,5117, dU = 1,8266, serta perhitungan untuk autokorelasi negatif (4 - dL = 2,4883 dan 4 - dU = 2,1734), terlihat bahwa nilai DW berada di atas 4 - dL (2,4883) dan juga jauh di atas dU (1,8266). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dianggap bebas dari autokorelasi, sehingga hasil analisisnya dapat dipercaya

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antarobservasi, yaitu apakah kesalahan (error) model berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini penting untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan tidak menghasilkan estimasi yang bias atau tidak

efisien. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Park, dan hasil pengolahan data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: D(Y) Method: Panel Least Squares Date: 12/30/25 Time: 11:35 Sample (adjusted): 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005922	0.002957	-2.002606	0.0482
D(X1)	0.000676	0.012341	0.054769	0.9564
D(X2)	0.834263	0.623083	1.338927	0.1839

R-squared	0.019493	Mean dependent var	-0.006084
Adjusted R-squared	-0.001822	S.D. dependent var	0.028690
S.E. of regression	0.028716	Akaike info criterion	-4.231667
Sum squared resid	0.075863	Schwarz criterion	-4.151018
Log likelihood	204.0042	Hannan-Quinn criter.	-4.199078
F-statistic	0.914509	Durbin-Watson stat	2.799959
Prob(F-statistic)	0.404325		

Sumber: output Eviews 12 SV (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Berdasarkan uji di atas dapat disimpulkan bahwa variabel inketimpangan ekonomi X_1 dan X_2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai *p-value* masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,4615 untuk X_1 dan 0,1221 untuk X_2. Dengan demikian, secara statistik hubungan antara X_1 maupun X_2 dengan variabel ketimpangan ekonomi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun koefisien kedua variabel bernilai positif, arah hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga model ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dimasukkan belum cukup menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, model ini perlu dipertimbangkan kembali, baik dengan menambahkan variabel lain, memperluas periode pengamatan, maupun mengevaluasi asumsi model agar analisis yang dihasilkan lebih akurat

2. Analisis Data Panel

Metode analisis data panel digunakan untuk menjelaskan dua jenis informasi sekaligus, yaitu informasi cross-section, yang menunjukkan perbedaan antar subjek, dan informasi time series, yang mencerminkan perubahan dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, model regresi panel yang digunakan adalah *Random Effect Model*, yang memungkinkan memperhitungkan ketimpangan ekonomi antar-individu sekaligus ketimpangan ekonomi waktu. Hasil estimasi menggunakan Random *Effect Model* ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/30/25 Time: 14:10

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 114

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.220871	0.013797	16.00913	0.0000
X1	0.001115	0.010705	0.104165	0.9172
X2	1.133154	0.245621	4.613425	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.013630	0.2415
Idiosyncratic random	0.024156	0.7585

Weighted Statistics

R-squared	0.163063	Mean dependent var	0.164656
Adjusted R-	0.147983	S.D. dependent var	0.026017

squared			
S.E. of regression	0.024015	Sum squared resid	0.064017
F-statistic	10.81326	Durbin-Watson stat	1.471467
Prob(F-statistic)	0.000051		

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Estimation Equation:

$$Y = C(1) + C(2)X_1 + C(3)X_2 + [CX = R]$$

Substituted Coefficients:

$$Y = 0.22087084188 + 0.00111511691171.X1 + 1.13315435462.X2 + [CX = R]$$

Koefisien persmaaan regresi linear berganda diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Jika semua variabel inketimpangan ekonomi (investasi, dan aglomerasi) dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan diperkirakan sebesar 22 %. Konstanta ini menggambarkan kondisi dasar ketimpangan tanpa pengaruh variabel inketimpangan ekonomi.
b. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi sebesar 0,1% akan menaikkan ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 0,1 % dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Artinya, semakin tinggi investasi, semakin rendah ketimpangan ekonomi.
c. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan

aglomerasi sebesar 113% akan meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 113, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Artinya, semakin tinggi tingkat aglomerasi, semakin besar ketimpangan antar wilayah.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel secara terpisah terhadap variabel yang diteliti, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Dari uji ini, kita dapat mengetahui pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada periode 2018–2023. Hasil pengujian masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan variabel mana yang benar-benar memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan.

Tabel 4.8

Hasil Uji t (Parsial)

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/30/25

Time: 10:06

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 114

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.220871	0.013797	16.00913	0.0000
X1	0.001115	0.010705	0.104165	0.9172
X2	1.133154	0.245621	4.613425	0.0000

Effects Specification

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,980992. erdasarkan hasil uji t-statistik, variabel investasi memperoleh nilai *t-hitung* sebesar 0,104165, yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai *t-tabel* sebesar 1,980922 (0.104165 < 1.980922). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023.

Sementara itu, variabel aglomerasi menghasilkan nilai *t-hitung* sebesar 4,613425, yang lebih besar daripada nilai *t-tabel* sebesar 1,99254 (4,613425 > 1,99254). Dengan demikian, H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel inketimpangan ekonomi secara bersama-sama memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk melihat apakah investasi (X_1) dan aglomerasi (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Y).

Tabel 4.9

Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.163063	Mean dependent var	0.164656
Adjusted R-squared	0.147983	S.D. dependent var	0.026017
S.E. of regression	0.024015	Sum squared resid	0.064017
F-statistic	10.81326	Durbin-Watson stat	1.471467
Prob(F-statistic)	0.000051		

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi *(probability)* sebesar 0,05. Derajat kebebasan df1 diperoleh dari jumlah variabel inketimpangan ekonomi dikurangi satu, yaitu (3 − 1 = 2), sedangkan derajat kebebasan df2 diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu (114 − 3 = 111). Nilai F hitung Sebesar 10.81326 > F tabel 3,07806 dan nilai Sig. 0,000051 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai (*probability)* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu, di mana nilai nol menunjukkan model tidak mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi sama sekali, sedangkan nilai satu menunjukkan model sepenuhnya mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi tersebut.

Tabel 4.10

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.163063	Mean dependent var	0.164656
Adjusted R-squared	0.147983	S.D. dependent var	0.026017
S.E. of regression	0.024015	Sum squared resid	0.064017
F-statistic	10.81326	Durbin-Watson stat	1.471467
Prob(F-statistic)	0.000051		

Sumber output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,163063 menunjukkan bahwa variabel inketimpangan ekonomi dalam model mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi sebesar 16,31%, sedangkan sisanya sebesar 83,69% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,147983 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah

variabel inketimpangan ekonomi dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi adalah sebesar 14,80%. Perbedaan antara *R-squared* dan *Adjusted R- squared* yang relatif kecil mengindikasikan bahwa model regresi masih cukup konsisten.

C. Pembahasan

1. Pengaruh secara Parsial Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan Hasil Penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa hasil output eviews 12 Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,980992. Berdasarkan hasil uji t-statistik, variabel investasi memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,104165, yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,980922 (0.104165 < 1.980922). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023. Hasil Regresi Tersebut sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten Dan Kota Tahun 2018-2023.

Sedangkan Pada koefisien Regresi investasi sebesar Koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi sebesar

0,1%akan menaikkan ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 0,1 %. Namun, Belum Menunjukkan hasil yang yang tidak signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten Dan Kota Tahun 2018-2023.

Hasil penelitian sejalaan dengan penelitian Agra Julihanza yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian Annisa Febriani yang menyatakan bahwa Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Hasil penelitian ini meyatakan pengaruh yang tidak signifikan menunnjukkan investasi PMA dan PMDN belum memberikan hasil yang maksimal di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan teori Mydral. Myrdal mengemukakan bahwa perpindahan modal dan adanya motif laba yang terus meningkat cenderung akan memperbesar ketimpangan ekonomi. Hal ini terjadi karena arus investasi lebih banyak mengalir ke wilayah-wilayah yang dianggap memiliki prospek keuntungan yang tinggi. Kondisi tersebut relevan dengan fenomena ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, di mana pembangunan dan aktivitas ekonomi cenderung terpusat pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya berkembang lebih lambat.

Menurut Myrdal, motif laba merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan tersebut umumnya hanya berlangsung di daerah-daerah yang memberikan harapan keuntungan investasi yang tinggi. Sebaliknya, wilayah yang kurang menarik bagi investor cenderung terabaikan sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan dan semakin tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat masih belum merata. Hal ini disebabkan oleh potensi dan keunggulan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi. Padahal, kearifan lokal memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya daerah sekaligus menyaring pengaruh budaya luar agar tidak menghilangkan karakteristik khas wilayah.

Keterkaitan antara kearifan lokal dan investasi terletak pada ciri khas yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Produk-produk lokal yang mencerminkan nilai budaya dan identitas daerah, apabila dikembangkan secara optimal, berpotensi meningkatkan daya saing wilayah serta menarik minat investor untuk menanamkan modal. Dengan demikian, penguatan kearifan lokal dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan investasi dan mengurangi

ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh secara Parsial Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi, hasil output EViews 9 menunjukkan bahwa nilai t-statistik pada variabel aglomerasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar 4,613425, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,99254 (4,613425 > 1,99254). Dengan demikian, H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023. Hasil regresi tersebut sejalan dengan penelitian Wella Amalia Yanuarti yang menyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah SWP VII Kediri.

Nilai koefisien regresi pada aglomerasi sebesar 1,13 menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat aglomerasi akan diikuti oleh peningkatan ketimpangan ekonomi, dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Artinya, semakin terkonsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah cenderung semakin besar. Hal ini menggambarkan bahwa aglomerasi berperan dalam memperlebar kesenjangan ekonomi antar daerah.

Teori Neo Klasik menjelaskan bahwa aglomerasi dapat terjadi di

suatu wilayah karena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki motif untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan ekonominya. Keuntungan tersebut muncul dalam bentuk keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. Keuntungan lokalisasi diperoleh ketika pelaku usaha berlokasi secara berdekatan atau terkonsentrasi dalam satu wilayah, sehingga biaya produksi dapat ditekan melalui kemudahan akses bahan baku, tenaga kerja, dan informasi. Sementara itu, keuntungan urbanisasi diperoleh dari penggunaan berbagai fasilitas dan infrastruktur secara bersama-sama dalam suatu pusat pertumbuhan, yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Munculnya aglomerasi di suatu daerah mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi dalam proses produksi. Efisiensi ini terjadi akibat adanya penghematan biaya yang diperoleh dari pengelompokan kegiatan ekonomi, sehingga aglomerasi menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan ekonomi di wilayah tertentu. Namun, perkembangan yang terkonsentrasi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi.

3. Pengaruh secara simultan investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (*probability*) sebesar 0,05. Derajat kebebasan df_1 diperoleh dari jumlah variabel independen dikurangi satu, yaitu $(3 - 1 = 2)$, sedangkan derajat

kebebasan df_2 diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu (114 − 4 = 110). Berdasarkan nilai df_1 dan df_2, diperoleh nilai F-tabel sebesar 0,951251. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel dan probability lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis, nilai *R-squared* sebesar 0,163063 menunjukkan bahwa investasi dan aglomerasi bersama-sama menjelaskan sekitar 16,30% perubahan ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, tahun 2018-2023 sedangkan sisanya 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini ternyata tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi bisa menjelaskan 87,15 persen ketimpangan, sedangkan sisanya 12,85 persen dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar model. Ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketimpangan tidak selalu sama dan bisa berbeda-beda tergantung kondisi yang diteliti.

Perbedaan ini kemungkinan muncul karena wilayah penelitian, periode waktu, dan jenis data yang digunakan berbeda. Selain itu, faktor-

faktor lain seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi secara umum, dan situasi sosial-ekonomi setempat juga bisa memengaruhi ketimpangan tetapi tidak termasuk dalam model penelitian. Jadi, meskipun variabel yang diteliti sama, pengaruhnya terhadap ketimpangan bisa berbeda-beda, dan penelitian ini memberi perspektif tambahan tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat di tar

4. Pandangan ekonomi islam terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023

Di zaman sekarang, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana membangun perekonomian yang selaras dengan prinsip-prinsip agama. Perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Tantangan ini muncul karena perkembangan ekonomi modern sering kali menimbulkan kesenjangan, konsentrasi kekayaan di beberapa pihak, dan praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah.

a) Investasi dalam ekonomi islam

Dalam Ekonomi Islam, investasi tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Artinya, investasi harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian yang tinggi), dan kegiatan yang dilarang (haram) seperti perjudian atau produksi barang haram. Selain itu, investasi

dalam Ekonomi Islam menekankan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial, sehingga hasil investasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya pemilik modal.

Investasi syariah dapat dilakukan melalui beberapa instrumen, seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil), musyarakah (penanaman modal bersama), dan wakaf produktif, yang semuanya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga distribusi kesejahteraan secara adil. Dengan prinsip-prinsip ini, investasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2018–2023, penerapan investasi sesuai prinsip Ekonomi Islam dapat membantu menyalurkan modal ke wilayah yang kurang berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi. Sebagiamana firman Allah SWT dalam (Q.S al-Baqarah: 261)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."*

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menabur satu biji benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Dalam konteks Ekonomi Islam, hal ini dapat dipahami sebagai investasi sosial: harta yang diinvestasikan untuk kepentingan umat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, atau pembangunan fasilitas umum, akan memberikan manfaat yang berlipat ganda baik secara spiritual maupun ekonomi.

Prinsip ini sejalan dengan konsep investasi dalam Ekonomi Islam, di mana modal tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan menyalurkan investasi secara tepat dan produktif, termasuk melalui instrumen syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wakaf produktif, pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2018–2023, penerapan prinsip investasi yang selaras dengan ajaran Islam dapat membantu menyalurkan modal ke wilayah yang kurang berkembang. Dengan demikian, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah, sehingga pembangunan ekonomi menjadi lebih adil dan merata.

b. Aglomerasi Dalam ekonomi Islam

Aglomerasi merupakan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah dapat mendorong efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, prinsip Ekonomi Islam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau kesenjangan. Walaupun aglomerasi meningkatkan produktivitas, jika distribusi manfaatnya tidak merata, hal ini justru dapat memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Hasil penelitian di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023 menunjukkan bahwa aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Dari perspektif Ekonomi Islam, hal ini menandakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi di beberapa wilayah tertentu telah menyebabkan ketimpangan, sehingga keuntungan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aglomerasi perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih adil. Sebagai mana dalam (Q.S Al-Hasyr :7)

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: *"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."*

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 menekankan bahwa harta yang diperoleh, baik dari ghanimah maupun sumber lain yang sah, tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya atau wilayah tertentu saja, tetapi harus dialokasikan secara adil untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Prinsip ini menekankan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dalam konteks aglomerasi, yaitu terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di beberapa wilayah tertentu, prinsip ayat ini menjadi relevan. Aglomerasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kegiatan, tetapi jika tidak diimbangi dengan distribusi manfaat yang adil, dapat memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah, sehingga keuntungan ekonomi hanya dinikmati sebagian pihak atau wilayah tertentu.

c. Ketimpangan dalam ekonomi islam

Ketimpangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan dan kekayaan antarindividu maupun antarwilayah tidak dibenarkan. Islam menekankan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara adil. Ketimpangan ekonomi yang tinggi menandakan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga sebagian masyarakat tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. sebagaimana dalam (Q.S At-Taubah: 103).

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini menegaskan bahwa zakat diambil dari harta orang kaya untuk menyucikan dan membersihkan harta mereka, sekaligus memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Dari perspektif Ekonomi Islam, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan menyalurkan zakat, harta tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, tetapi mengalir

kepada fakir, miskin, dan golongan yang berhak, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan.

Selain aspek materi, ayat ini juga menekankan dimensi spiritual dan sosial do'a orang yang memberi zakat membawa ketenteraman bagi mereka, dan harta yang disalurkan secara adil akan membersihkan harta sekaligus hati, sehingga kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi berjalan seiring dengan nilai-nilai agama.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2018–2023, penerapan zakat dan instrumen redistribusi lain dapat membantu menyeimbangkan manfaat pertumbuhan ekonomi, termasuk dari investasi dan aglomerasi, agar seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak positif pembangunan dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh secara Parsial Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Hasil uji t-statistik, variabel investasi memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,104165, yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,980922 (0.104165 < 1.980922). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018– 2023.

2. Pengaruh secara Parsial Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2023. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi, hasil output EViews 9 menunjukkan bahwa nilai t-statistik pada variabel aglomerasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar 4,613425, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,99254 (4,613425 > 1,99254).

3. Pengaruh secara simultan investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi

(*probability*) sebesar 0,05. Derajat kebebasan df_1 diperoleh dari jumlah variabel independen dikurangi satu, yaitu (3 − 1 = 2), sedangkan derajat kebebasan df_2 diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu (114 − 4 = 110). Berdasarkan nilai df_1 dan df_2, diperoleh nilai F-tabel sebesar 0,951251. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel dan probability lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023.

B. Saran

1. Dalam investasi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat misalnya seperti meningkatkan kearifan lokal dengan menyediakan wadah masyarakat untuk promosi produk lokal, memberikan keringanan pajak dan juga memberikan kepastian hukum sehingga bagi investor yang baru mengembangkan usahanya bisa tertarik dan nyaman untuk berusaha di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera barat.
2. Dalam aglomerasi, maka pemerintah harus melakukan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga keberadaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat memberikan dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, karena ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 maka kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera barat harus bekerja lebih maksimal lagi karena upaya-upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan masih belum optimal. Misalnya dengan melakukan pengawasan yang ketat sehingga kebijakan atau peraturan yang telah dibuat bisa terealisasi dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhamad Mu'izz, and Abdul Bari Awang, 'Wasiat Dan WisAbah : Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim', *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8.1 (2021), pp. 55–74

Adam, Moh. Nasrul Arief Setiawan, Dewi Indrayani Hamin, and Hasim Hasim, 'Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme Dan Ekonomi Syariah: Sebuah ANalisis Kritis Terhadap Prinsip, Implemnetasi Dan Dampak Sosial', *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7.2 (2024), pp. 1011–24

Afdhal Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal Syamsurizal, Robby Reza Zulfikri, Mursal Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, Emily Nur Saidy, *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)

Afif, Dika Hasto Muhammad, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018', *Diponegoro Journal of Economics*, 11.3 (2024), pp. 176–86, doi:10.14710/djoe.34841

Akbar Asy'ari Muh, Winarsa Hari, 'Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi', *Of Islamic Studies*, 6.1 (2016), p. 27

Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi, 'Transformasi Paradigma Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8.1 (2024), p. 729, doi:10.33087/ekonomis.v8i1.1703

Anwar Annisa Anjani, Rorong Ita Pingkan, and Tolosang Krest, 'Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.6 (2023), pp. 85–96

Aprianoor, Pritha, and Muhammad Muktiali, 'Pravitasari AE, Rustiadi E, Priatama RA, Murtadho A, Kurnia AA, Mulya SP, Saizen I, Widodo CE, Wulandari S. 2021. Spatiotemporal Distribution Patterns and Local Driving Factors of Regional Development in/Ijgi10120812.', *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4.4 (2015), pp. 484–98

Asnita Frida Sebayang, *Ekonomi Regional*, ed. by

Astuti, 2016, 'Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi Di Indonesia', *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15.1 (2016), pp. 165–75

Aziza, Tri Noor, and Desak Widhiatuti Srimarchea, 'Penanganan Daerah Tertinggal Di Indonesia', *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7.1 (2023), pp. 1584–1600, doi:10.37250/khazanah.v7i1.185

Azizah, Firla, Nur Wulan Ramdhaniah, and Mohammad Ridwan, 'Peran Zakat, Infak, Dan Sedekah Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan', *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2 (2025), p. 333

Deddy Ibrahim Rauf, 'Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 2.6 (2024), pp. 268–76

DPR RI, 'Teori Harrod-Domar', 1 (2023), p. 3

Dwi Hastuti, Loso Judijanto, Sri Yani Kusumastuti, Parmadi Parmadi, Alifah Rokhmah Idialis, Hermien Triyowati, Nuriah Alfisyahri, Putri Intan Suri, Tri Kunawangsih, Etik Umiyati, Jaya Kusuma Edy, Faradina Zevaya, *Ekonomi II* (Buku Son Pedia, 2025)

Efendi, Listya Okta, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Ketimpangan Antarwilayah', *Circle Archive*, 2025, pp. 1–7

'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Ketimpangan Antarwilayah', *Circle Archive*, 3.8 (2025), pp. 1–7

Esther Kembauw, Lexy J. Sinay, Aphrodite M. Sahusilawane, *Ekonomi Perekonomian Maluku* (Deepublish, 2015)

Fatihudin, D, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi* (Deepublish, 2019) <www.deepubish.co.id>

Fatimah, Kusdianti, Vanny Himmatul Amalia, and Endang Kartini Panggiarti, 'Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (2022), pp. 68–76

Fitrah Sari Islami, and Nugroho SBM, 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia', *Media Ekonomi*

Dan Manajemen, 33.1 (2018), pp. 29–39

Ginting, Ari Mulianta, 'Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (The Effect of Interregional Development Inequality on Poverty in Indonesia)', *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*, 20 (2015), pp. 45–58

Hadju, Ingli Intan, Vecky A.J Masinambouw, and Mauna Th. B Maramis, 'Analisis Ketimpangan ekonomiwilayah Di Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21.01 (2021), pp. 110–20

Harsono, Iwan, *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Teori, Kebijakan, Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Desa Sampul Depan Iwan Harsono* (Mega Press Nusantara, 2024)

Hidayat, Wahyu, 'Perencanaan Ekonomi Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan ekonomi wilayah Pendapatan Dan Kemiskinan' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), p. 26

Himawan Arif Sutanto, Moh. Zaini, and Syamsidar Sinaga Irmanelly, Abdul Azizs, *Pengantar Ekonomi*, (Naga Pustaka, 2019)

Imma Widyawati Agustin, Septiana Hariyani, *Pengelolaan Infrastruktur Kota Dan Wilayah* (Universitas Brawijaya Press, 2023)

Jaluli, Sulaiman, 'Ekonomi Dalam Alquran', *DEEPUBLISH*, 2018, p. 131

Joni, Yefri, *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al Shadr* (Wade Group National Publishing, 2021)

Julianti Zarotun Ikhsan, Fiby, Ecca Ratu Nurdiana, Riya Titi Kusumadewi, M Wildan Fathul Faza, Amalia Nuril Hidayati, and Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 'Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan Peran Investasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Menurut Tinjauan Ekonomi Islam', 6.1 (2025), pp. 62–71

Kemensesneg, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024', *Kementerian Sekretariat Negara*, 018390, 2020, pp. 1–8

Kumara, Bima Prasetya, and Cikit Apriyanti, 'Determinasi Aglomerasi Industri Di Sumatera Utara : Pendekatan Hoover Balassa Index Periode 2018 – 2023',

6.1 (2025), pp. 28–42

Loso Judijanto, Fahrul Agus, Eka Siskawati, Muhammad Ansar, Renny Threesje Tumo ber, Albert Lumbu, Vandan Wiliyanti, Riky Rizki Junaidi, Selfiana Selfiana, Wulan Octi Prati, 'METODE PENELITIAN ILIMIAH', *Sonpedia Jambi*, 2025, p. 29

Mahanum, Mahanum, 'Tinjauan Kepustakaan', *ALACRITY : Journal of Education*, 1.2 (2021), pp. 1–12, doi:10.52121/alacrity.v1i2.20

Masitah, Dewi, Aris Munandar, and Lalu Suhartana, 'Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal', *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 677–87 <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3894>

Maulana, Isra, 'OPTIMALISASI PERAN KOPERASI DALAM MENDUKUNG UMKM: MENINGKATKAN AKSES MODAL, PENGUASAAN TEKNOLOGI, DAN EKSPANSI PASAR', *Investasi Islam*, 7 (2022), pp. 5–6 <http://dx.doi.org/10.32505/jii>

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 'Economic Development', *Penerbi Erlangga*, 2006, p. 248

Mu'minah, Sulton, and M. B. Zubakhrum Tjenreng, 'Desentralisasi Dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8.1 (2025), pp. 342–51, doi:10.37481/sjr.v8i1.1053

Muhammad Latif Ridwan, Farid Fadli Ramadan, Khoirul Mubarok, Fahrul Hidayat, and Khafif Ainul Khakim, 'Dampak Kebijakan Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Di Kota Salatiga', *Journal Of Economic Research*, 1.1 (2025), pp. 9–22, doi:10.56799/joer.v1i1.2

Nadya, Aufa, and Syafri Syafri, 'Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), pp. 37–52, doi:10.25105/me.v27i1.5300

Nafisatur, M, ‘Metode Pengumpulan Data Penelitian’, *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3.5 (2024), pp. 5423–43

Nisa, Cholly Fatun, Arivina Ratih Yulihar Taher, Prayudha Ananta, and I Wayan Suparta, ‘Analisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Di 34 Provinsi Di Indonesia’, *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 3 (2025), pp. 454–66, doi:10.23960/efebe.v3i2.254

Novirin, Barli, ‘Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pelaksanaannya Di Beberapa Wilayah Indonesia’, *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), pp. 60–69, doi:10.53491/oikonomika.v2i1.111

Nur, Muh, ‘Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas’ (Adap CV. Adanu Abimata, 2024), p. 58

Pardiansyah, Elif, ‘Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920

Purba, Aisyah Amelia, Dinda Putri Agelia, Noer Natasya, and Khairina Tambunan, ‘Derivatif : Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam’, *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2025, p. 6

Putri, Gita Tiara Marhayu, and Bambang Santoso, ‘Sistem Investasi Di Indonesia’, *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1.2 (2024), pp. 303–16 <https://jurnal.sitasi.id/toman/article/view/98>

Raharja, Mahardhika Cipta, and Unik Lestari, ‘Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja’, *Oeconomicus Journal of Economics*, 6.2 (2022), pp. 86–101, doi:10.15642/oje.2022.6.2.86-101

Raharti, Rini, Titi Laras, and Oktavianti Oktavianti, ‘Model Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Inequality Model of Economic Development in Indonesia’, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12.28 (2021), pp. 257–70, doi:10.33059/jseb.

Rahmadana, Muhammad Fitri, *Teori-Teori Tentang Wilayah Dan Migrasi Muhammad Fitri Rahmadana*, ed. by Badrus Sholeh (Penerbit CV. Pena Persada. Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa, 2020)

Ramenggila, Silvia Delvita, Nudiatulhuda Mangun, and Santi Yunus, 'Dampak Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.3 (2025), p. 2778

Ratna Ayu Wijayanti, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, and Renny Oktafia, 'Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2024), p. 72, doi:10.59024/jise.v2i2.671

Ridwan, Ismail Hajiali, and Rifai, *Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil)*, *Perpustakaan Belajar*, 2022

Ridwan, and Saprudin, *Ekonomi Regional Edisi Revisi* (Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024)

Rosa, Yenni Del, 'Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient)', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3.2 (2019), p. 208, doi:10.33087/ekonomis.v3i2.83

Sadan, 'Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi', *Marifah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Peradaban Islam*, 1.2 (2024), pp. 81–98, doi:10.64173/mrf.v1i2.52

Sahban, Muhammad Amsal, *Kolaborasi Ekonomi Di Negara Berkembang* (CV. Sah Media Makasar, 2018)

Samosir, Valentina Elaristi, 'Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General On Trade In Services (GATS)', *Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), p. 14

Santoso, Ismanto Hadi, 'Statistik I Penerbit Uwks Press', 2023, pp. 1–166

Sjafizal, *Ekonomi Regional* (Baduose Media, 2008)

Sjafrizal, 'Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi. Padang Baduose Media',

CET/1 (Padang : Baduose Media., 2008), p. 103

Suhendra, Indra, and Dita Ayu Irawati, 'Pengaruh Tabungan, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6.2 (2016), pp. 256–75, doi:10.35448/jequ.v6i2.4346

Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Deepublish, 2018)

Sumadi, Eko Sumardianto, 'Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9.1 (2025), pp. 93–110, doi:10.46773/imtiyaz.v9i1.1589

T. Ahmad Dadek, Safrizal ZA, Mahdi Syahbandir · 2024, *PERENCANAAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA Tinjauan Filsafat, Teori, Dan Implementasi; Panduan Bagi Teknokrat, Akademisi, Dan Politisi Dalam Perencanaan Ekonomi* (Badan Perencanaan Ekonomi Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh, 2024)

Tahun, Republik Indonesia, 'UU RI No.25 Tahun 2004', *Sistem Perencanaan Ekonomi Nasional*, 2007

Tiara, Ade, and Mulyo Hendarto, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Kedungsepur Tahun 2011-2020', *Diponegoro Journal of Economics*, 12.3 (2023), pp. 1–12

Tri Mauleny, Ariesy P, 'Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Ekonomi Jakarta', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6.2 (2015), pp. 147–62

Valentina, Frida Venti, Vicky Alfiyan, and Mochammad Isa Anshori, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Era Desentralisasi', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 1.5 (2024), pp. 285–92

Wendy Liana, Sri Yani Kusumastuti, Darwin Damanik, Dalizanolo Hulu, Apriyanto Apriyanto, Loso Judijanto, Tono Wartono, Suharto Suharto, Fitriyana Fitriyana, Hariyono Hariyono, Jana Milia, *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia

Publishing Indonesia, 2024)

Werianton, Rahmi Fitri Ayu, *EKONOMI REGIONAL DAN WILAYAH* (CV. AZKA PUSTAKA, 2025)

Widodo Dwi Pramono, *Modul Tenik Analisis Dan Perencanaan Wilayah* (Deepublish, 2001)

Wirdanengsih, Syaiful Anwar, *Ekonomi Daerah Tertinggal Dalam Perspektif Sosial* (Deepublish Digital, 2025)

Yeniwati, 'Yeniwat, Ketimpangan Ekonomi Antar Di Sumatera', *Jurnal Kajian Ekonomi j 2.032013),1-21.*, II.03 (2013), pp. 1–21

Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa, 'KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol 5 No 2 Agustus 2024, ISSN: 2745-8407*, 5.02 (2024), p. 85

Yuliani, Irma, *PENGARUH BELANJA DAN INVESTASI TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PENGARUH BELANJA DAN INVESTASI TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI* (Uwais Inspirasi Dunia, 2019)

Yusuf, Muhammad, and Jefriyanto Jefriyanto, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau', *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 1.1 (2021), pp. 80–88, doi:10.56870/ambitek.v1i1.8

Zasriati, Masrida, 'Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia', *E-Journal Al Dzahab*, 3.2 (2020), pp. 119–31

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	23.661,20	0	23.661,20	1.000.000.	0,0236612
2	Pesisir Selatan	33.512,10	390.130,20	423.642,30	1.000.000.	0,4236423
3	Solok	2.449,90	29.735,40	32.185,30	1.000.000.	0,0321853
4	Sijunjung	466,9	52.164,10	52.631,00	1.000.000.	0,052631
5	Tanah Datar	3.387,10	838	4.225,10	1.000.000.	0,0042251
6	Padang Pariaman	2.768,80	245.052,60	247.821,40	1.000.000.	0,2478214
7	Agam	746	353.379,70	354.125,70	1.000.000.	0,3541257
8	Lima Puluh Kota	1.028,30	8.056	9.084,30	1.000.000.	0,0090843
9	Pasaman	0	1.000	1.000,00	1.000.000.	0,001
10	Solok Selatan	52.265,70	518.726,60	570.992,30	1.000.000.	0,5709923
11	Dharmasraya	21.104,70	14.683,50	35.788,20	1.000.000.	0,0357882
12	Pasaman Barat	2.026,80	374.553,50	376.580,30	1.000.000.	0,3765803
13	Kota Padang	37.364,70	302.053,10	339.417,80	1.000.000.	0,3394178
14	Kota Solok	0	1.873	1.873,00	1.000.000.	0,001873
15	Kota Sawah Lunto	0	0	0,00	1.000.000.	0
16	Kota Padang Panjang	17,5	3.850	3.867,50	1.000.000.	0,0038675
17	Kota Bukittinggi	0	11.353,90	11.353,90	1.000.000.	0,0113539
18	Kota Payakumbuh	0	0	0,00	1.000.000.	0
19	Kota Pariaman	0	2.000	2.000,00	1.000.000.	0,002

Lampiran 2

Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	466,1	14.464	14.930	1.000.000	0,0149301
2	Pesisir Selatan	3.609,30	182.386,90	185.996	1.000.000	0,1859962
3	Solok	402,9	68.583,80	68.987	1.000.000	0,0689867
4	Sijunjung	27.622,90	105.108	132.731	1.000.000	0,1327309
5	Tanah Datar	20.478,60	155,1	20.634	1.000.000	0,0206337
6	Padang Pariaman	158,6	251.927,60	252.086	1.000.000	0,2520862
7	Agam	3.554,80	133.952,60	137.507	1.000.000	0,1375074
8	Lima Puluh Kota	709	53.641,30	54.350	1.000.000	0,0543503
9	Pasaman	0	39.100	39.100	1.000.000	0,0391
10	Solok Selatan	72.467,10	339.618,70	412.086	1.000.000	0,4120858
11	Dharmasraya	4.312,50	11.620,20	15.933	1.000.000	0,0159327
12	Pasaman Barat	4.604,40	309.985,10	314.590	1.000.000	0,3145895
13	Kota Padang	18.601,80	1.417.802,60	1.436.404	1.000.000	1,4364044
14	Kota Solok	0	8.775,90	8.776	1.000.000	0,0087759
15	Kota Sawah Lunto	0	10.700	10.700	1.000.000	0,0107
16	Kota Padang Panjang	0	13.716,90	13.717	1.000.000	0,0137169
17	Kota Bukittinggi	125,9	55.000	55.126	1.000.000	0,0551259
18	Kota Payakumbuh	0	10.107,10	10.107	1.000.000	0,0101071
19	Kota Pariaman	0	0	0	1.000.000	0

Lampiran 3

Perhitungan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	148,8	15.743,30	15.892,10	1.000.000	0,0158921
2	Pesisir Selatan	10.892,10	184.129,80	195.021,90	1.000.000	0,1950219
3	Solok	223,9	56.660,40	56.884,30	1.000.000	0,0568843
4	Sijunjung	3.215,50	20.918	24.133,50	1.000.000	0,0241335
5	Tanah Datar	3.565,50	60,9	3.626,40	1.000.000	0,0036264
6	Padang Pariaman	9.956,80	1.186.922,70	1.196.879,50	1.000.000	1,1968795
7	Agam	8.778,30	26.651,70	35.430,00	1.000.000	0,03543
8	Lima Puluh Kota	65,2	254.827,50	254.892,70	1.000.000	0,2548927
9	Pasaman	0,8	600	600,80	1.000.000	0,0006008
10	Solok Selatan	13.872,80	812.710,40	826.583,20	1.000.000	0,8265832
11	Dharmasraya	3.557,40	10.544	14.101,40	1.000.000	0,0141014
12	Pasaman Barat	22.660	14.683,90	37.343,90	1.000.000	0,0373439
13	Kota Padang	48.609	435.150,20	483.759,20	1.000.000	0,4837592
14	Kota Solok	0	3.813	3.813,00	1.000.000	0,003813
15	Kota Sawah Lunto	0	0	0,00	1.000.000	0
16	Kota Padang Panjang	0	26.590,30	26.590,30	1.000.000	0,0265903
17	Kota Bukittinggi	43,3	15.500	15.543,30	1.000.000	0,0155433
18	Kota Payakumbuh	0	7.631,30	7.631,30	1.000.000	0,0076313
19	Kota Pariaman	0	33.041,30	33.041,30	1.000.000	0,0330413

Lampiran 4

Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	1.158	6.892,80	8.050,80	1.000.000	0,0158921
2	Pesisir Selatan	3.993	568.515,10	572.508,10	1.000.000	0,1950219
3	Solok	75	124.454	124.529,00	1.000.000	0,0568843
4	Sijunjung	0	36.739,30	36.739,30	1.000.000	0,0241335
5	Tanah Datar	0	1.728,10	1.728,10	1.000.000	0,0036264
6	Padang Pariaman	114	995.818,20	995.932,20	1.000.000	0,9959322
7	Agam	1.240	43.832,20	45.072,20	1.000.000	0,03543
8	Lima Puluh Kota	708	670.166,40	670.874,40	1.000.000	0,2548927
9	Pasaman	84	108.876,50	108.960,50	1.000.000	0,0006008
10	Solok Selatan	9.342	371.449,70	380.791,70	1.000.000	0,8265832
11	Dharmasraya	4.558	129.851,80	134.409,80	1.000.000	0,0141014
12	Pasaman Barat	7.052	66.710	73.762,00	1.000.000	0,0373439
13	Kota Padang	38.325	886.614,60	924.939,60	1.000.000	0,4837592
14	Kota Solok	0	23.367,60	23.367,60	1.000.000	0,003813
15	Kota Sawah Lunto	0	2.663,50	2.663,50	1.000.000	0,0026635
16	Kota Padang Panjang	295	76.324,70	76.619,70	1.000.000	0,0265903
17	Kota Bukittinggi	0	11.284,20	11.284,20	1.000.000	0,0155433
18	Kota Payakumbuh	0	29.346,10	29.346,10	1.000.000	0,0076313
19	Kota Pariaman	0	29.079,10	29.079,10	1.000.000	0,0330413

Lampiran 5

Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	114,5	29.375,30	29.489,80	1.000.000	0,0294898
2	Pesisir Selatan	236,4	155.715,60	155.952,00	1.000.000	0,155952
3	Solok	2.213,10	87.645,90	89.859,00	1.000.000	0,089859
4	Sijunjung	1.279,70	139.302,30	140.582,00	1.000.000	0,140582
5	Tanah Datar	39,3	11.560	11.599,30	1.000.000	0,0115993
6	Padang Pariaman	155,4	344.266,20	344.421,60	1.000.000	0,3444216
7	Agam	1.210,50	83.498,80	84.709,30	1.000.000	0,0847093
8	Lima Puluh Kota	601,2	282.694,90	283.296,10	1.000.000	0,2832961
9	Pasaman	211,4	23.589	23.800,40	1.000.000	0,0238004
10	Solok Selatan	8.113,70	243.853,20	251.966,90	1.000.000	0,2519669
11	Dharmasraya	5.902,10	328.113,90	334.016,00	1.000.000	0,334016
12	Pasaman Barat	17.505,80	207.246	224.751,80	1.000.000	0,2247518
13	Kota Padang	57.967,40	462.089,20	520.056,60	1.000.000	0,5200566
14	Kota Solok	0	12.700,70	12.700,70	1.000.000	0,0127007
15	Kota Sawah Lunto	0	112.592,90	112.592,90	1.000.000	0,1125929
16	Kota Padang Panjang	74,3	12.112,60	12.186,90	1.000.000	0,0121869
17	Kota Bukittinggi	0	3.449,60	3.449,60	1.000.000	0,0034496
18	Kota Payakumbuh	0	17.453,50	17.453,50	1.000.000	0,0174535
19	Kota Pariaman	0	2.491,10	2.491,10	1.000.000	0,0024911

Lampiran 6

Perhitungan Realisasi Investasi Pma dan Pmdn Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Dalam Desimal)

No	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1	Kepulauan Mentawai	0	11.667,70	11.667,70	1.000.000	0,0116677
2	Pesisir Selatan	0	15.384,10	15.384,10	1.000.000	0,0153841
3	Solok	0	13.600,80	13.600,80	1.000.000	0,0136008
4	Sijunjung	0	255.681,30	255.681,30	1.000.000	0,2556813
5	Tanah Datar	2	15.971,70	15.973,70	1.000.000	0,0159737
6	Padang Pariaman	478,7	1.198.224,70	1.198.703,40	1.000.000	1,1987034
7	Agam	0	377.151	377.151,00	1.000.000	0,377151
8	Lima Puluh Kota	306,5	282.573,40	282.879,90	1.000.000	0,2828799
9	Pasaman	724,5	65.452,60	66.177,10	1.000.000	0,0661771
10	Solok Selatan	0	235.620,20	235.620,20	1.000.000	0,2356202
11	Dharmasraya	0	879.128,70	879.128,70	1.000.000	0,8791287
12	Pasaman Barat	0	72.215,80	72.215,80	1.000.000	0,0722158
13	Kota Padang	0	609.329	609.329,00	1.000.000	0,609329
14	Kota Solok	0	22.097,60	22.097,60	1.000.000	0,0220976
15	Kota Sawah Lunto	0	212.792,50	212.792,50	1.000.000	0,2127925
16	Kota Padang Panjang	0	9.721,40	9.721,40	1.000.000	0,0097214
17	Kota Bukittinggi	32,6	13.374,30	13.406,90	1.000.000	0,0134069
18	Kota Payakumbuh	0	57.989,10	57.989,10	1.000.000	0,0579891
19	Kota Pariaman	0	1.781,30	1.781,30	1.000.000	0,0017813

Lampiran 7

Perhitungan Aglomerasi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Desimal)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag	pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag	pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag	pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag	pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag	pdrb/kab kota	pdrb sumbar	ag
1	Kepulauan Mentawai	47.059	833.162	0,056482	50.125	880.819	0,056907	53.188	867.754	0,061294	54.603	897.461	0,060842	60.449	995.280	0,060736	64.696	1.074.654	0,060202
2	Pesisir Selatan	28.317	833.162	0,033987	30.115	880.819	0,03419	28.040	867.754	0,032313	29.268	897.461	0,032612	32.077	995.280	0,032229	34.311	1.074.654	0,031927
3	Solok	34.098	833.162	0,040926	36.208	880.819	0,041107	34.772	867.754	0,040071	35.879	897.461	0,039978	39.424	995.280	0,039611	42.717	1.074.654	0,03975
4	Sijunjung	36.309	833.162	0,04358	38.153	880.819	0,043315	38.995	867.754	0,044938	40.299	897.461	0,044903	44.343	995.280	0,044553	47.913	1.074.654	0,044585
5	Tanah Datar	35.125	833.162	0,042159	37.530	880.819	0,042608	35.097	867.754	0,040446	36.286	897.461	0,040432	39.722	995.280	0,03991	42.900	1.074.654	0,03992
6	Padang Pariaman	49.455	833.162	0,059358	50.952	880.819	0,057846	41.723	867.754	0,048082	42.314	897.461	0,047149	50.019	995.280	0,050256	55.542	1.074.654	0,051684
7	Agam	39.240	833.162	0,047098	41.609	880.819	0,047239	38.631	867.754	0,044518	39.911	897.461	0,044471	43.937	995.280	0,044145	47.405	1.074.654	0,044112
8	Lima Puluh Kota	38.274	833.162	0,045938	40.606	880.819	0,0461	40.595	867.754	0,046782	41.810	897.461	0,046587	45.693	995.280	0,04591	49.452	1.074.654	0,046017
9	Pasaman	29.872	833.162	0,035854	31.469	880.819	0,035727	30.022	867.754	0,034597	31.090	897.461	0,034642	33.702	995.280	0,033862	36.272	1.074.654	0,033752
10	Solok Selatan	30.965	833.162	0,037166	32.249	880.819	0,036613	30.541	867.754	0,035195	31.309	897.461	0,034886	34.199	995.280	0,034361	36.778	1.074.654	0,034223
11	Dharmasraya	40.144	833.162	0,048183	41.176	880.819	0,046747	44.981	867.754	0,051836	46.450	897.461	0,051757	51.886	995.280	0,052132	55.626	1.074.654	0,051762
12	Pasaman Barat	33.523	833.162	0,040236	34.315	880.819	0,038958	35.461	867.754	0,040865	36.472	897.461	0,040639	40.306	995.280	0,040497	43.428	1.074.654	0,040411
13	Kota Padang	61.235	833.162	0,073497	65.134	880.819	0,073947	68.509	867.754	0,07895	70.884	897.461	0,078983	78.356	995.280	0,078728	84.528	1.074.654	0,078656
14	Kota Solok	53.432	833.162	0,064132	56.475	880.819	0,064116	55.293	867.754	0,06372	57.010	897.461	0,063524	62.882	995.280	0,06318	67.600	1.074.654	0,062904
15	Kota Sawah Lunto	55.002	833.162	0,066016	58.616	880.819	0,066547	56.292	867.754	0,064871	58.530	897.461	0,065217	65.737	995.280	0,066049	71.214	1.074.654	0,066267
16	Kota Padang Panjang	60.347	833.162	0,072431	64.189	880.819	0,072874	61.920	867.754	0,071357	64.124	897.461	0,07145	70.732	995.280	0,071067	76.314	1.074.654	0,071013
17	Kota Bukittinggi	62.206	833.162	0,074663	65.897	880.819	0,074813	71.391	867.754	0,082271	74.001	897.461	0,082456	82.854	995.280	0,083247	89.737	1.074.654	0,083503
18	Kota Payakumbuh	45.883	833.162	0,055071	49.878	880.819	0,056627	49.100	867.754	0,056583	51.809	897.461	0,057728	57.734	995.280	0,058008	62.020	1.074.654	0,057712
19	Kota Pariaman	52.676	833.162	0,063224	56.123	880.819	0,063717	53.203	867.754	0,061311	55.412	897.461	0,061743	61.228	995.280	0,061518	66.201	1.074.654	0,061602

Lampiran 8

Data Penelitian

Kabupaten/Kot	Tahun	Gini Ratio	Investasi	Agloemerasi
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kabupaten/Kot	Tahun	Gini Ratio	Investasi	Agloemerasi
[illegible]	2018	0,4036	0,00	0,4036
	2019	0,4446	0,00	0,4446
	2020	0,3708	0,07	0,3708
	2021	0,4211	0,00	0,4211
	2022	0,2444	0,00	0,2444
	2024	0,2519	0,00	0,2519
[illegible]	2018	0,2515	0,00	0,2515
	2019	0,2116	0,00	0,2116
	2020	0,2061	0,00	0,2061
	2021	0,2514	0,00	0,2514
	2022	0,2116	0,00	0,2116
	2024	0,2519	0,00	0,2519
[illegible]	2018	0,4034	0,01	0,4034
	2019	0,2815	0,01	0,2815
	2020	0,2772	0,01	0,2772
	2021	0,2116	0,01	0,2116
	2022	0,2114	0,01	0,2114
	2024	0,2415	0,01	0,2415
[illegible]	2018	0,4	0,01	0,4
	2019	0,2914	0,01	0,2914
	2020	0,2659	0,01	0,2659
	2021	0,217	0,01	0,217
	2022	0,2114	0,01	0,2114
	2024	0,2614	0,01	0,2614
[illegible]	2018	0,2906	0,01	0,2906
	2019	0,2726	0,01	0,2726
	2020	0,2746	0,01	0,2746
	2021	0,215	0,01	0,215
	2022	0,2511	0,01	0,2511
	2024	0,216	0,01	0,216
[illegible]	2018	0,2966	0,00	0,2966
	2019	0,2917	0,00	0,2917
	2020	0,2567	0,01	0,2567
	2021	0,2659	0,01	0,2659
	2022	0,2115	0,01	0,2115
	2024	0,2517	0,01	0,2517
[illegible]	2018	0,2567	0,01	0,2567
	2019	0,2511	0,01	0,2511
	2020	0,2728	0,01	0,2728
	2021	0,2712	0,01	0,2712
	2022	0,2908	0,01	0,2908
	2024	0,2515	0,01	0,2515
[illegible]	2018	0,2908	0,01	0,2908
	2019	0,2468	0,01	0,2468
	2020	0,2222	0,01	0,2222
	2021	0,2111	0,01	0,2111
	2022	0,2024	0,01	0,2024
	2024	0,2941	0,01	0,2941
[illegible]	2018	0,2966	0,01	0,2966
	2019	0,414	0,01	0,414
	2020	0,453	0,01	0,453
	2021	0,2118	0,01	0,2118

Lampiran 9

Hasil Regresi

Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.063022
X2	-0.063022	1.000000

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: D(Y) Method: Panel Least Squares Date: 12/30/25 Time: 11:35 Sample (adjusted): 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005922	0.002957	-2.002606	0.0482
D(X1)	0.000676	0.012341	0.054769	0.9564
D(X2)	0.834263	0.623083	1.338927	0.1839

R-squared	0.019493	Mean dependent var	-0.006084
Adjusted R-squared	-0.001822	S.D. dependent var	0.028690
S.E. of regression	0.028716	Akaike info criterion	-4.231667
Sum squared resid	0.075863	Schwarz criterion	-4.151018
Log likelihood	204.0042	Hannan-Quinn criter.	-

			4.199078
F-statistic	0.914509	Durbin-Watson stat	2.799959
Prob(F-statistic)	0.404325		

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dependent Variable: D(Y) Method: Panel Least Squares Date: 12/30/25 Time: 11:35 Sample (adjusted): 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005922	0.002957	-2.002606	0.0482
D(X1)	0.000676	0.012341	0.054769	0.9564
D(X2)	0.834263	0.623083	1.338927	0.1839

R-squared	0.019493	Mean dependent var	-0.006084
Adjusted R-squared	-0.001822	S.D. dependent var	0.028690
S.E. of regression	0.028716	Akaike info criterion	-4.231667
Sum squared resid	0.075863	Schwarz criterion	-4.151018
Log likelihood	204.0042	Hannan-Quinn criter.	-4.199078
F-statistic	0.914509	Durbin-Watson stat	2.799959
Prob(F-statistic)	0.404325		